

**PERGESERAN MITRA PERDAGANGAN MINYAK UTAMA  
VENEZUELA DARI AMERIKA SERIKAT KE TIONGKOK DALAM  
PERGOLAKAN SANKSI AMERIKA SERIKAT  
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**AULIYA EKA SAFITRI**

21323037

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**PERGESERAN MITRA PERDAGANGAN MINYAK UTAMA  
VENEZUELA DARI AMERIKA SERIKAT KE TIONGKOK DALAM  
PERGOLAKAN SANKSI AMERIKA SERIKAT  
SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**AULIYA EKA SAFITRI**

21323037

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

### **Pergeseran Mitra Perdagangan Minyak Utama Venezuela dari Amerika Serikat ke Tiongkok dalam Pergolakan Sanksi Amerika Serikat**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



*Karina*  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 2 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 3 Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.IP., M.A.

Tanda Tangan



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Yogyakarta, 5 November 2025*



---

*Auliya Eka Safitri*

## DAFTAR ISI

|                                                                                                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                                       | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                               | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                             | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR GRAFIK.....</b>                                                                             | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR DIAGRAM.....</b>                                                                            | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                                             | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                  | <b>xi</b>   |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>                                                                        | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                              | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                                             | 6           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                                                           | 6           |
| 1.4 Cakupan penelitian .....                                                                          | 7           |
| 1.5 Tinjauan Pustaka .....                                                                            | 7           |
| 1.6 Kerangka Pemikiran .....                                                                          | 10          |
| 1.7 Argumen Sementara .....                                                                           | 15          |
| 1.8 Metode Penelitian.....                                                                            | 16          |
| 1.8.1 Jenis Penelitian .....                                                                          | 16          |
| 1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian .....                                                               | 16          |
| 1.8.3 Metode Pengumpulan Data .....                                                                   | 16          |
| 1.8.4 Proses Penelitian.....                                                                          | 16          |
| 1.9 Sistematika Pembahasan.....                                                                       | 17          |
| <b>BAB 2 DINAMIKA KERJA SAMA VENEZUELA DAN TIONGKOK<br/>PASCA SANKSI AMERIKA SERIKAT.....</b>         | <b>18</b>   |
| 2.1 Pergolakan Ekonomi Politik Venezuela dan Dampak Sanksi Amerika<br>Serikat .....                   | 18          |
| 2.2 Dominasi Tiongkok di Amerika Selatan dan Kerja Sama Perdagangan<br>Minyak Venezuela-Tiongkok..... | 26          |
| <b>BAB 3 ANALISIS BANDWAGONING .....</b>                                                              | <b>32</b>   |
| 3.1 Tingkat Keparahan Ancaman (Perilaku Venezuela terhadap Tiongkok)....                              | 32          |
| 3.2 Konflik dengan Pihak Ketiga.....                                                                  | 42          |
| 3.2.1 Kolombia.....                                                                                   | 43          |
| 3.2.2 Guyana.....                                                                                     | 51          |
| 3.3 Bantuan Kekuatan Besar (Amerika Serikat) .....                                                    | 54          |
| <b>BAB 4 PENUTUP .....</b>                                                                            | <b>66</b>   |
| 4.1 Kesimpulan.....                                                                                   | 66          |
| 4.2 Rekomendasi.....                                                                                  | 66          |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>68</b> |
|----------------------------|-----------|

## DAFTAR TABEL

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Tabel 1. <i>Level of Bandwagoning</i> | 13 |
| Tabel 2. <i>Analisis Bandwagoning</i> | 61 |

## **DAFTAR GRAFIK**

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 1. Nilai produksi dan ekspor minyak Venezuela (2013-2023)                    | 21 |
| Grafik 2. Produksi Minyak Mentah Venezuela, Impor AS, dan Peristiwa Sanksi Tertentu | 59 |

## **DAFTAR DIAGRAM**

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Diagram 1. Tujuan Ekspor Minyak Venezuela (2023)                      | 28 |
| Diagram 2. Ekspor Minyak Mentah Venezuela (Januari 2017-Oktober 2022) | 50 |
| Diagram 3. Pengungsi Venezuela di Amerika Latin dan Karibia           | 60 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. <i>Explaining Bandwagoning</i>                      | 11 |
| Gambar 2. <i>Alignment Intensity with a Potential Hegemon</i> | 13 |
| Gambar 3. Peta Wilayah Essequibo                              | 51 |

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas pergeseran mitra perdagangan minyak utama Venezuela dari Amerika Serikat ke Tiongkok dalam konteks penerapan sanksi minyak oleh Amerika Serikat sejak tahun 2017. Sanksi tersebut berdampak signifikan terhadap kapasitas produksi, pendapatan nasional, serta stabilitas ekonomi dan politik Venezuela. Di tengah keterpurukan ekonomi, Venezuela mencari alternatif pasar ekspor minyak dan memperkuat hubungan strategis dengan Tiongkok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teori *Bandwagoning* untuk menjelaskan kecenderungan Venezuela dalam menyesuaikan kebijakan luar negerinya terhadap kekuatan besar yang dominan. Analisis menunjukkan bahwa tekanan ekonomi akibat sanksi mendorong Venezuela melakukan *bandwagoning* dengan Tiongkok melalui kerja sama minyak, pinjaman berbasis komoditas, serta dukungan investasi strategis. Pergeseran ini tidak hanya mencerminkan upaya Venezuela untuk bertahan dari isolasi ekonomi, tetapi juga memperlihatkan dinamika persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Amerika Latin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Venezuela berada pada tahap *full alignment*, di mana ketergantungan terhadap Tiongkok semakin mendalam baik dalam aspek ekonomi maupun politik luar negeri.

**Kata-kata kunci:** Venezuela, Tiongkok, sanksi Amerika Serikat, perdagangan minyak, *bandwagoning*.

## ABSTRACT

This research examines the shift in Venezuela's main oil trading partner from the United States to China amid the imposition of U.S. oil sanctions since 2017. These sanctions significantly affected Venezuela's oil production capacity, national revenue, and overall economic and political stability. Facing economic collapse, Venezuela sought alternative export markets and strengthened its strategic partnership with China. Using a qualitative approach and the Bandwagoning Theory, this study analyzes Venezuela's tendency to align its foreign policy with a dominant power to ensure national survival. The findings indicate that U.S. sanctions pushed Venezuela to adopt a bandwagoning strategy toward China through oil trade cooperation, commodity-backed loans, and strategic investment support. This shift not only reflects Venezuela's efforts to endure economic isolation but also highlights the broader geopolitical rivalry between the United States and China in Latin America. The study concludes that Venezuela's strategy has reached the stage of full alignment, as its dependence on China has deepened both economically and diplomatically.

**Keywords:** Venezuela, China, U.S. sanctions, oil trade, bandwagoning.

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Venezuela merupakan salah satu negara di Amerika Selatan penghasil minyak bumi terbesar di dunia sekaligus salah satu negara pendiri *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) pada tahun 1961 bersama 4 negara penghasil minyak raksasa lainnya (Strauss Center n.d.). Venezuela mencapai jumlah produksi minyak mentah tertingginya pada tahun 1970 berkisar 3,71 juta barel per hari dan rata-rata 3 juta barel per hari antara awal tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an (Resilience 2022).

Perekonomian Venezuela yang sangat potensial mendorong Amerika Serikat untuk menjalin hubungan kerja sama yang strategis dengan Venezuela, bahkan Venezuela sudah sejak lama menjadi pemasok bahan bakar mentah bagi Amerika Serikat (Iskandar dan Rani 2021). Amerika Serikat menerima 600.000 barel minyak per hari dari Venezuela atau sepertiga dari produksi harian dan mewakili 75% arus kas negara sepanjang tahun 2017 menurut Badan Informasi Energi Amerika Serikat (RTL Today, 2018).

Cadangan minyak yang melimpah menciptakan ketergantungan ekonomi yang tidak sehat pada sektor minyak. Ketergantungan ini ditandai dengan besarnya angka ekspor minyak dari perusahaan minyak milik negara yang berkontribusi sebesar 95% dari total ekspor negara tersebut (Shabani 2017). Ketergantungan yang sangat besar pada sektor minyak menjadikan Venezuela sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia (Muhammad Ghufon 2020).

Pada tahun 2014, mulai terjadi penurunan harga minyak yang sangat drastis

(BBC News Indonesia 2016). Harga minyak yang awalnya mencapai 100 dolar per barel pada musim panas tahun 2014 mengalami kemerosotan hingga 33 dolar per barel pada awal tahun 2016. Penurunan harga minyak menyebabkan berkurangnya cadangan devisa negara yang memaksa pemerintah untuk mencabut subsidi barang dan jasa yang telah diberikan kepada masyarakat (Shabani 2017). Di tahun 2017 terjadi fenomena hiperinflasi karena pemerintah Venezuela melakukan pencetakan uang secara masif untuk membiayai defisit anggaran pemerintah (Rodríguez dan Iyer 2021).

Hiperinflasi mengakibatkan melemahnya nilai mata uang, sehingga hampir 90% warga Venezuela jatuh miskin pada tahun 2019. PBB melaporkan, pada Desember 2019 hampir 4,8 juta penduduk Venezuela meninggalkan negaranya karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertahan hidup (Van Roekel dan De Theije 2020). Hingga tahun 2024, sejumlah 7,7 juta warga negara telah meninggalkan Venezuela (UNHCR n.d.). Munculnya otokrasi selama beberapa tahun terakhir di masa kepemimpinan Presiden Nicolás Maduro juga dinilai melanggar prinsip dasar demokrasi (Diana Roy dan Amelia Cheatham 2024).

Venezuela menghadapi dua konflik kawasan utama, yaitu dengan Kolombia dan Guyana. Dengan Kolombia, perselisihan berakar pada sengketa Kepulauan Los Monjes (Michelotti 2015), dan berbagai isu perbatasan yang melibatkan kelompok kriminal serta tuduhan dukungan Venezuela terhadap FARC dan ELN (Haughton dan Lewis 2024), yang mana AS berkontribusi memberikan dukungan untuk pasukan keamanan Kolombia (Seelke dan Ribando 2025). Sementara itu, konflik Venezuela–Guyana berkaitan dengan klaim atas wilayah Essequibo (Minfor n.d.). Eskalasi ini mendorong keterlibatan eksternal, termasuk dukungan Amerika Serikat

yang menempatkan aset militernya dan melakukan latihan gabungan dengan Angkatan Pertahanan Guyana Wilkinson 2024).

Karakteristik Maduro yang otoriter dan ketidakmampuan Maduro dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan menimbulkan kecaman dari berbagai negara termasuk Amerika Serikat (Anggun Novitasari 2022). Dalam kondisi krisis, Amerika Serikat berusaha menawarkan bantuan kemanusiaan kepada Venezuela melalui *United State Agency for International Development* (USAID) pada awal tahun 2019 (U.S. Southern Command 2019), akan tetapi Presiden Maduro menolak tawaran Amerika Serikat tersebut (Ashidiqi dan Hanura 2019). Sebagai akibatnya, Amerika Serikat memperluas sanksi ekspor minyak kepada Venezuela. Dalam Eksekutif Order 13850, Amerika Serikat melarang entitas dalam negeri untuk melakukan transaksi dengan PDVSA kecuali dengan izin Departemen Keuangan. Peraturan ini juga diberlakukan untuk entitas non Amerika Serikat. Kemudian setelah fase *wind-down-period* resmi dalam 90 hari, AS memberhentikan impor minyak mentah dari Venezuela (Seelke dkk. 2022).

Sanksi minyak yang diberikan Amerika Serikat berpengaruh besar terhadap perekonomian Venezuela. Sanksi yang diberikan Amerika Serikat menjadikan mobilitas impor bahan bakar Venezuela terbatas. Pada tahun 2018, terjadi kemerosotan perekonomian negara yang ditandai dengan meningkatnya inflasi mencapai angka 63.374% (Statista 2025). Tentunya, pemerintah Venezuela tidak bisa membiarkan kondisi ini terjadi secara terus menerus. Venezuela berupaya untuk membentuk pola ekspor minyak yang berbeda dengan mencari mitra ekspor utama yang lebih strategis dan mulai menggeser mitra perdagangan minyaknya ke negara Timur dengan menjadikan Tiongkok sebagai tujuan ekspor minyak utama

dari Oktober 2020 sampai Oktober 2022 (Seelke dkk. 2022).

Perubahan orientasi ekspor minyak Venezuela ke Tiongkok berkaitan dengan semakin luasnya pengaruh Beijing di Amerika Latin dan Karibia. Kebutuhan Tiongkok akan pangan, energi, dan pasar baru mendorong peningkatan hubungan dagang dalam dua dekade terakhir. Tiongkok mengembangkan strategi keterlibatan di kawasan, mulai dari perluasan perdagangan, integrasi melalui *Belt and Road Initiative* (BRI), penanaman modal asing, hingga diplomasi pinjaman yang secara bertahap memperkuat posisi ekonominya di kawasan. Di Venezuela, Kolombia, dan Guyana, Tiongkok telah lama menyumbangkan dan menjadi pemasok pesawat militer (Johnston 2025).

Kerja sama Venezuela dan Tiongkok mulai menguat sejak awal kepemimpinan Hugo Chávez pada 1999 (Trinkunas n.d.), sejalan dengan agenda Revolusi Bolivarian yang menekankan restrukturisasi PDVSA dan pemanfaatan minyak sebagai basis kekuatan nasional (Matt Ferchen 2020). Kunjungan pertama Chávez ke Beijing pada 1999 menjadi titik awal kemitraan strategis dan eksplorasi pasar minyak untuk mengurangi dominasi Amerika Serikat (Dominguez 2024), bertepatan dengan meningkatnya kebutuhan energi Tiongkok di awal 2000-an (Mendes 2012).

Sejak Amerika Serikat memberlakukan sanksi minyak dan memblokir pembelian minyak dari PDVSA pada tahun 2017, Amerika Serikat juga telah melakukan penyitaan terhadap CITGO, anak perusahaan Venezuela di AS senilai 8 miliar USD, serta membekukan dana Venezuela di 50 lembaga keuangan internasional senilai 5,5 miliar USD (Budisatria dkk. 2022). Hal ini menghambat mobilitas perdagangan minyak Venezuela yang bergantung pada dolar dalam

transaksi jual beli minyak dengan negara lain. Sebagai respon dari jeratan tirani dolar, Venezuela kemudian menerbitkan harga minyak mentah dalam Yuan Tiongkok (AA Turkiye 2017).

Menurut dua perusahaan pelacak kapal tanker, untuk memangkas biaya logistik dan menyamarkan transaksi jual beli minyak di tengah sanksi Amerika Serikat, sejak Juli 2024 para pedagang merekayasa nama pengirim minyak Venezuela ke Tiongkok menjadi minyak mentah Brazil senilai lebih dari 1 miliar USD (Aizhu 2025). Sanksi terhadap minyak Venezuela telah meningkatkan biaya pembelian minyak mentah Venezuela oleh Beijing. Dalam kondisi ini perusahaan-perusahaan Tiongkok melakukan rekayasa finansial strategis diantaranya dengan menyamarkan pengiriman minyak mentah sebagai campuran bitumen dan melakukan penukaran minyak mentah dari kapal-kapal tanker di perairan Malaysia untuk menyembunyikan identitas asal minyak sebelum dibongkar di pelabuhan Tiongkok (Atalayar 2025).

Pelacak tanker Kpler menyajikan data pembelian minyak Venezuela oleh Tiongkok sejumlah 300.000 *barel per day* (BPD), dengan total 110 juta barel pembelian minyak per tahun pada 2022 (Andrew Hayley 2023). Hingga tahun 2025, minyak Venezuela telah diakuisisi sejumlah 68% oleh perusahaan swasta Tiongkok (Atalayar 2025).

Kedekatan Venezuela dan Tiongkok didesain dalam bentuk pinjaman yang didukung komoditas, yang mana Venezuela menjadi debitur terbesar bagi Tiongkok. Pemberian pinjaman oleh Tiongkok menghubungkan ekspor minyak Venezuela dengan pembiayaan infrastruktur Tiongkok. Bentuk kerja sama ini memungkinkan Venezuela untuk mendiversifikasi mitra ekspor minyaknya agar

tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat. Ini juga menjadi pilihan bagi Venezuela untuk memperoleh pendanaan pembangunan di tengah konflik dengan Amerika Serikat yang juga menguntungkan bagi Tiongkok karena membuka gerbang Tiongkok untuk masuk ke pasar Amerika Selatan dan mengamankan cadangan minyak dari negara penghasil minyak mentah terbesar dunia (Rosales dan Shaw 2023).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari penjabaran yang dipaparkan di latar belakang, maka muncul pertanyaan tentang “bagaimana strategi Venezuela dalam mengubah kemitraan minyak utama dari Amerika Serikat ke Tiongkok?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dampak sanksi minyak Amerika Serikat terhadap kapasitas produksi dan ekspor energi Venezuela;
2. Mengkaji dinamika politik kawasan Amerika Latin yang mempengaruhi pergeseran aliansi Venezuela di tengah persaingan kekuatan besar;
3. Menjelaskan gejolak rival dua kekuatan besar Amerika Serikat dan Tiongkok yang berebut kekuasaan dengan dominasi minyak dunia, dalam hal ini minyak Venezuela;
4. Menganalisis bagaimana Venezuela menjalin kerja sama perdagangan minyak dengan Tiongkok dan bagaimana strategi *bandwagoning*

diwujudkan melalui kebijakan luar negeri energi Venezuela dalam pergolakan sanksi minyak yang diberikan oleh Amerika Serikat.

#### **1.4 Cakupan penelitian**

Penelitian ini mencakup pembahasan mengenai perubahan mitra perdagangan minyak Venezuela setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi minyak terhadap Venezuela. Bagaimana tindakan Amerika Serikat menjadi ancaman bagi kondisi ekonomi politik Venezuela. Penetapan sanksi membuat hubungan kedua negara merenggang, dimana penetapan sanksi ini semakin memperparah kondisi ekonomi yang terjadi akibat adanya inflasi. Di sisi lain, posisi Venezuela di kawasan semakin tertekan akibat konflik dengan negara tetangga Kolombia dan Guyana. Dalam menyikapi hal ini, Venezuela mulai menjalin kedekatan dengan negara Timur, dimana penulis akan berfokus pada pembahasan mengenai kedekatan Venezuela dengan Tiongkok dalam pergolakan sanksi minyak yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap Venezuela sejak tahun 2017 hingga 2025. Kemudian, penulis juga akan membahas bagaimana penyesuaian strategi kebijakan perdagangan minyak yang diambil oleh pemerintah Venezuela ini mengarah kepada strategi *bandwagoning* dalam interaksinya dengan Tiongkok.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Untuk membantu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk merujuk beberapa jurnal dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pergeseran mitra kerja sama perdagangan minyak Venezuela dari Amerika Serikat. Kemudian, peneliti akan melakukan peninjauan terhadap penelitian-

penelitian tersebut untuk memperkuat argumen yang ditulis dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas mengenai strategi apa saja yang digunakan oleh Venezuela dalam menghadapi sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat, serta bagaimana negara-negara lain yang mengalami kondisi yang sama keluar dari permasalahan ekonomi yang muncul akibat penetapan sanksi tersebut.

Benedicte Bull dan Antulio Rosales dari University of Oslo dalam penelitiannya yang dipublikasikan oleh *Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika* (CEDLA) pada tahun 2020 yang berjudul “*The Crisis in Venezuela: Drivers, Transitions, and Pathways*” menganalisis mengenai fenomena krisis yang terjadi di Venezuela sebagai negara dengan ciri khas ekonomi rentier. Krisis yang terjadi menimbulkan respon kecaman terhadap kondisi demokrasi di Venezuela dari semua lini. Ini terjadi karena Venezuela mengalami transisi politik dari rezim demokrasi ke rezim otoriter. Kemudian, terjadi keruntuhan pada perekonomian penyewa hingga munculnya pergolakan tatanan regional dan global. Menghadapi situasi ini, Venezuela memanfaatkan aliansi baru dalam ekonomi politiknya, dimana Rusia dan Tiongkok datang sebagai aktor kepentingan baru dalam perekonomian Venezuela. Disisi lain, Venezuela menolak segala bentuk tekanan dan intervensi dari negara lain terutama Amerika Serikat terhadap problematika dalam negeri, meskipun venezuela sedang dihadapi dengan krisis ekonomi dan permasalahan politik internal yang rumit.

Kemudian, Yafie Shahna dan Rika Isnarni dari Universitas Pertamina Jakarta dalam penelitiannya yang dipublikasi di *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* pada tahun 2022 yang berjudul “Pendekatan Diplomasi Energi Tiongkok Terhadap Venezuela” memaparkan mengenai analisis diplomasi

energi yang dilakukan oleh Tiongkok kepada Venezuela. Dalam hal ini, Tiongkok dan Venezuela menjalin strategi kerja sama yang dikenal dengan istilah “*China-Venezuela Joint Fund*”. Kedekatan Tiongkok dan Venezuela dalam aktivitas perdagangan minyak didasarkan atas kepentingan yang saling menguntungkan. Dimana, Tiongkok menjadi negara dengan tingkat konsumsi minyak bumi yang besar, disisi lain Venezuela merupakan salah satu negara penghasil minyak utama dunia. Dengan kondisi Venezuela yang sedang berada dalam ancaman sanksi Amerika Serikat yang mempengaruhi kondisi ekonomi negara secara masif, Venezuela membutuhkan Tiongkok sebagai alternatif sumber pendapatan ekspor minyak. Tentunya, ini menjadi kesempatan emas bagi kedua negara untuk menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.

Selanjutnya, Nuryanti dan Salsabila dari Universitas Muhammadiyah Malang dalam penelitiannya yang dipublikasikan di *Sospol: Jurnal Sosial Politik* pada tahun 2019 berjudul “Strategi Kebijakan Pemerintah Venezuela di Tengah Krisis” menerangkan tentang bagaimana Venezuela mencoba untuk bertahan di tengah kondisi negara yang kacau. Presiden Nicolas Maduro membentuk beberapa kebijakan diantaranya, kebijakan diversifikasi ekonomi, membentuk program kerja sama bantuan ekonomi dengan Tiongkok, memperkuat kerja sama multilateral di tingkat regional kawasan Amerika Latin, memperbaiki layanan kesehatan, hingga kebijakan stabilitas pangan. Kemudian, Venezuela juga menjalin kedekatan dengan beberapa negara seperti Tiongkok, India, Palestina, dan Kuba. Satu hal yang digaris bawahi, Presiden Nicolás Maduro dalam hal ini intens melakukan pendekatan dengan Tiongkok, dimana Tiongkok dengan Venezuela membuat sebuah perjanjian hutang yang mengatas dasarkan minyak sebagai pengganti bantuan hutang yang

diberikan Tiongkok kepada Venezuela. Tentunya, adanya perjanjian yang dibuat oleh kedua negara berperan besar dalam membantu Venezuela menghadapi krisis ekonomi akibat sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat.

Alexandra G. Koval dan Mikhail I. Sorokin dalam penelitiannya yang ditulis dalam bahasa Rusia dan dipublikasikan oleh *RUDN Journal of Economics* pada Desember 2021 berjudul “*Economic Relations Between China and venezuela: Modern Characteristic and Prospect*” membahas bagaimana krisis ekonomi politik di Venezuela mampu mengeskalasi hubungan ekonomi Venezuela dengan Tiongkok, yang mana Tiongkok menjadi mitra utama Venezuela dalam bidang investasi, kredit, dan perdagangan minyak. Tiongkok mendesain kerja sama dengan Venezuela menggunakan retorika “kemitraan Selatan-Selatan”, namun pada prakteknya lebih menyerupai relasi “Utara-Selatan” yang diwarnai oleh kepentingan ekonomi dan geopolitik.

Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada pembahasan tentang dinamika sanksi minyak Amerika Serikat terhadap Venezuela dan masuknya aktor luar seperti Tiongkok ke dalam problematika sanksi ini, namun belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana Venezuela menggunakan strategi *bandwagoning* dalam menjalin kerja sama dengan Tiongkok.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

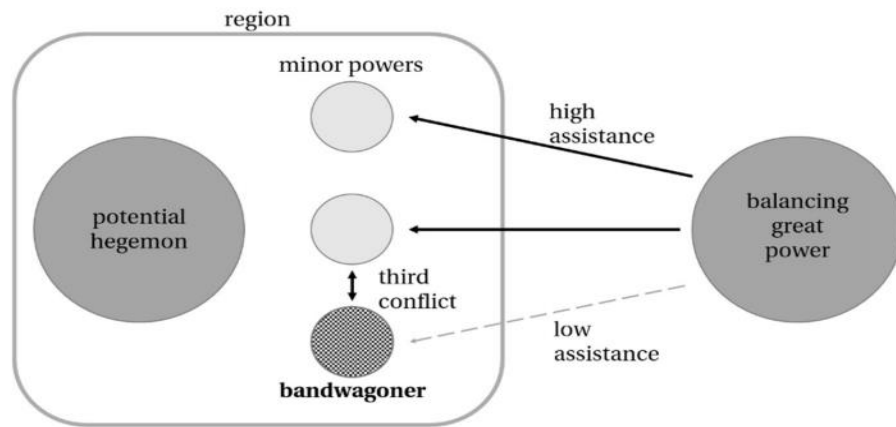
Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis pergeseran mitra perdagangan minyak utama Venezuela dari Amerika Serikat ke Tiongkok dalam penelitian ini adalah *Bandwagoning Theory*. *Bandwagoning* dalam Hubungan Internasional adalah turunan dari teori realisme dan merupakan kebalikan dari

*Balancing Power* dalam spektrum pilihan kebijakan luar negeri. Teori ini menjelaskan pola interaksi antar negara ketika menghadapi potensi ancaman. Negara yang lemah akan bersekutu dengan kekuatan besar dan mempercayakan keamanannya pada negara tersebut, kemudian mendukung kepentingan luar negerinya (Motin 2024).

Pilihan negara untuk melakukan tindakan *bandwagon* dikelompokkan ke dalam 2 motif utama, *offensive bandwagoning* dan *defensive bandwagoning*. *Offensive bandwagoning* yaitu keputusan untuk bersekutu dengan negara pengancam untuk mencapai kepentingan internasional, sedangkan *defensive bandwagoning* ditujukan untuk meredakan konflik dengan harapan negara pengancam tidak menjadikan negaranya sebagai target berikutnya. Namun, kedua motif tersebut umumnya tidak dapat dipisahkan. Artinya, kebijakan yang tampaknya ofensif bisa saja memiliki motif defensif (Motin 2024).

Tindakan *bandwagoning* dengan negara hegemon potensial dapat dijelaskan dalam dinamika antara konflik dengan negara ketiga di kawasan dan tidak adanya bantuan dari Amerika Serikat. Lebih dari itu, teori ini memperhitungkan 3 variabel kausal: tingkat keparahan ancaman (tinggi/rendah), konflik dengan pihak ketiga (rendah/sedang/tinggi), dan bantuan kekuatan besar, dalam hal ini Amerika Serikat (sedang/rendah/tidak ada) (Motin 2024).

### **Gambar 1. Explaining Bandwagoning**



Sumber: Motin (2024)

1. Tingkat keparahan ancaman: **Tinggi**, merupakan kondisi ketika negara hegemon kemungkinan besar dapat menaklukkan negara target secara menyeluruh atau setidaknya dapat menduduki wilayah inti di negara tersebut dalam waktu singkat. **Rendah**, merupakan kondisi ketika hegemon potensial mampu mengancam negara target, namun cukup kesulitan dalam menaklukkan negara tersebut bahkan wilayah intinya.
2. Konflik dengan pihak ketiga. **Rendah**, menunjukkan hubungan yang cenderung baik berdasarkan hubungan diplomatik. **Sedang**, ditandai dengan interaksi terbatas, retorika bermusuhan, dan terkadang terdapat perebutan perbatasan terbatas. **Tinggi**, menggambarkan ketegangan intens, tidak adanya diplomasi, serta adanya kemungkinan perang.
3. Bantuan kekuatan besar. **Sedang**, menyiratkan bantuan ekonomi dan militer tingkat rendah, deklarasi non-konfrontatif, dan kontak tingkat tinggi. **Rendah**, hampir tidak terlihat adanya dukungan apapun, namun diplomasi tetap berlanjut. **Tidak ada**, menunjukkan tidak terjadinya diplomasi atau retorika yang mendukung. Dalam beberapa kasus, negara pemberi bantuan benar-benar memusuhi, bahkan mengancam menggunakan kekuatan hingga

menggulingkan rezim (Motin 2024).

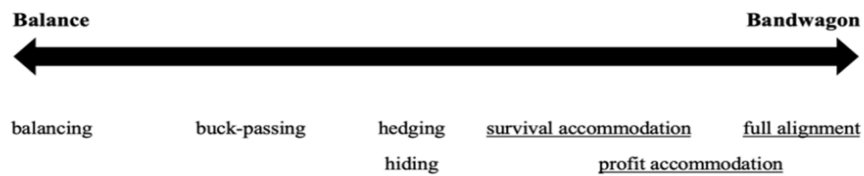
Secara analitis, *bandwagoning* dibagi menjadi tiga kemungkinan hasil, yaitu *accommodation*, *full alignment*, dan *captivity*.

**Tabel 1. Level of Bandwagoning**

| Level  | Tipe              | Deskripsi                                                        |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| rendah | akomodasi         | sebagian besar selaras, tetapi tetap menjaga jarak               |
| tinggi | keselarasan penuh | hubungan yang erat dan terbatas dengan negara-negara penyeimbang |
| total  | tahanan           | penyelarasan penuh, kedaulatan kebijakan luar negeri hilang      |

Sumber: Motin (2024)

**Gambar 2. Alignment Intensity with a Potential Hegemon**



Sumber: Motin (2024)

1. *Accommodation* (akomodasi). Negara *bandwagon* yang mengakomodasi memiliki potensi hegemon bagi negara hegemon potensial, tetap menjaga hubungan dengan negara hegemon potensial, dan tidak selalu melakukan penyesuaian kebijakan luar negeri dengan negara tersebut, bahkan kemungkinan mengarah pada konflik kecil.
2. *full alignment* (keselarasan penuh). Negara yang melakukan keselarasan penuh merupakan sekutu erat hegemon potensial dan setia menjadikan

kebijakan luar negerinya sebagai preferensi, serta tidak terlihat perselisihan karena jarang terjadi.

3. *Captivity* (tahanan). Negara *bandwagon* yang menjadi tahanan berarti telah kehilangan kedaulatan dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Ini terjadi ketika negara hegemon potensial telah berhasil menembus aparatur negara, yang mana keputusan-keputusan penting tidak mungkin diambil tanpa persetujuannya (Motin 2024).

### **Justifikasi penggunaan teori:**

Meskipun teori bandwagoning banyak digunakan untuk menjelaskan respons negara terhadap ancaman militer, dalam dunia modern, perkembangan tradisi realisme termasuk neorealisme tidak membatasi ancaman hanya pada dimensi militer. Neo-realisme juga membantu menjelaskan bagaimana negara memanfaatkan kebijakan ekonomi untuk mempertahankan pengaruh atau melindungi kepentingan nasionalnya, yang direpresentasikan dalam perang dagang maupun sanksi ekonomi (Walter n.d.). Adapun terjemahan indikator isu keamanan (ancaman militer) ke isu ekonomi (ancaman ekonomi) sebagai berikut:

1. Ancaman tinggi → Motin dalam teori ini menggambarkan ancaman yang tinggi ketika negara hegemon kemungkinan besar dapat menaklukkan negara target secara menyeluruh atau setidaknya dapat menduduki wilayah inti di negara tersebut dalam waktu singkat. Sehingga, ketika diterjemahkan ke dalam konteks ekonomi, maka ancaman dikategorikan tinggi ketika negara hegemon potensial kemungkinan besar mampu melumpuhkan perekonomian atau setidaknya menggoyahkan sektor fundamental negara.

2. Ancaman rendah → Motin dalam teori ini mengkategorikan ancaman berskala rendah ketika hegemon potensial mampu mengancam negara target, namun cukup kesulitan dalam menaklukkan negara tersebut bahkan wilayah intinya. Sehingga, jika diterjemahkan ke dalam konteks ekonomi, maka ancaman dikatakan rendah ketika negara hegemon potensial memiliki pengaruh ekonomi tetapi tidak mampu menggoyahkan sektor fundamental atau hanya mampu memberikan tekanan terbatas.

### 1.7 Argumen Sementara

Dampak sanksi minyak Amerika Serikat terhadap kondisi ekonomi politik Venezuela yang kemudian melatarbelakangi keputusan Caracas untuk mendekat dengan Tiongkok, serta kecenderungan untuk melakukan strategi *bandwagoning* perlu dijelaskan dengan menganalisis 3 variabel sebab akibat yang terdiri dari, tingkat keparahan ancaman (tinggi/rendah), konflik dengan pihak ketiga (rendah/sedang/tinggi), dan bantuan kekuatan besar Amerika Serikat (sedang/rendah/tidak ada). Kemudian, kecenderungan perilaku Venezuela dalam interaksinya dengan Tiongkok akan dikaji melalui intensitas hubungan yang mereka jalankan, yang diklasifikasikan menjadi 3 kemungkinan hasil, yaitu *accommodation*, *full alignment*, atau *captivity*. Melihat situasi politik dan ekonomi Venezuela yang semakin tertekan karena sanksi minyak Amerika Serikat dan adanya isu-isu di kawasan sangat memungkinkan Venezuela untuk mendekati negara-negara hegemon potensial seperti Tiongkok. Karena kemitraan Venezuela dan Tiongkok dalam kepentingan perdagangan minyak ini mengindikasikan adanya strategi *bandwagoning* Venezuela terhadap kekuatan besar Tiongkok, maka perlu

diteliti lebih lanjut apakah Venezuela dalam kasus ini sudah masuk pada fase *accommodation*, *full alignment*, atau *captivity*.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dimana hasil penelitian akan dipaparkan menggunakan model deskriptif yang berfokus pada pembahasan mengenai pergeseran mitra perdagangan minyak utama Venezuela dari Amerika Serikat ke Tiongkok dalam pergolakan sanksi minyak Amerika Serikat.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek penelitian dalam studi kasus yang diangkat adalah Venezuela, dimana Venezuela berperan sebagai aktor yang bertindak untuk memformulasikan kebijakan saat negara berada dalam ancaman negara lain. Sedangkan, perubahan pola mitra perdagangan minyak venezuela menjadi fokus objek dalam penelitian ini.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data menggunakan metode riset pustaka dengan melakukan penelusuran jurnal, buku, dan artikel secara daring maupun luring. Beberapa situs daring yang digunakan untuk mencari sumber bacaan diantaranya google scholar, situs resmi pemerintahan, dan website jurnal akademis lainnya. Sedangkan, pencarian sumber bacaan luring akan dilakukan di perpustakaan UII.

### *1.8.4 Proses Penelitian*

Penulis akan mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian data akan

dikelola untuk dianalisis. Data yang telah terkumpul akan dibaca dan dipahami, selanjutnya akan disortir untuk menggabungkan sub bab penelitian yang sama. Terakhir, penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

### **BAB 1: Pendahuluan**

Bab 1 mencakup latar belakang yang menguraikan tentang alasan yang menyebabkan munculnya rumusan masalah pada penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, jenis penelitian, hingga sistematika pembahasan.

### **BAB 2: Dinamika kerja sama Venezuela dan Tiongkok pasca sanksi Amerika Serikat**

Bab 2 membahas mengenai sejarah pergolakan ekonomi politik Venezuela, posisi Venezuela di kawasan, dan dinamika kerja sama dengan Tiongkok pasca memanasnya hubungan dengan Amerika Serikat.

### **BAB 3: Analisis *bandwagoning***

Bab 3 memaparkan analisis mengenai *bandwagoning* Venezuela terhadap Tiongkok. Bagian ini akan mengkaji mengenai indikator kausal strategi *bandwagoning* yang diambil oleh Venezuela dan mengukur sejauh mana ketergantungan Venezuela pada Tiongkok sebagai kekuatan hegemoni potensial.

### **BAB 4: Kesimpulan**

Menguraikan tentang kesimpulan penelitian dan rekomendasi penelitian lanjutan.

## **BAB 2**

### **DINAMIKA KERJA SAMA VENEZUELA DAN TIONGKOK PASCA SANKSI AMERIKA SERIKAT**

Sejarah panjang gejolak ekonomi politik Venezuela diwarnai oleh konflik kepentingan penguasa dan sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika Serikat (Global Americans 2023). Kehancuran Venezuela berawal dari buruknya kebijakan ekonomi nasional, disusul peran sanksi yang muncul baru-baru ini (Frank Muci 2024). Tekanan dari berbagai arah yang dirasakan oleh Venezuela memaksa negara ini untuk mengambil strategi berbeda untuk memulihkan perekonomian, terutama di sektor minyak. Hasilnya, kemitraan dengan Tiongkok diperkuat akibat dinamika ancaman sanksi.

#### **2.1 Pergolakan Ekonomi Politik Venezuela dan Dampak Sanksi Amerika Serikat**

Sepanjang 1920-an, minyak berkontribusi penting pada pertumbuhan luar biasa PDB per kapita Venezuela. Angka tersebut relatif meningkat dari 20% pada 1920 mencapai 90% pada 1958 (Bello dkk. 2011). Sejak ditemukannya sumber minyak mentah sekitar tahun 1913, Venezuela terbukti memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia yang prosedur pengelolaannya didominasi oleh konsesi dengan perusahaan asing. Di antara tahun 1960-1970-an, pemerintah menginisiasi nasionalisasi industri minyak yang berdampak pada penghambatan pembangunan. Proses nasionalisasi menyebabkan penurunan produksi minyak mentah sebesar 55% dari puncaknya pada 1970 hingga pertengahan 1980-an, diiringi dengan penurunan produktivitas tenaga kerja di sektor minyak hingga 70%

pada periode tersebut. Nasionalisasi industri minyak berdampak negatif pada kondisi fiskal karena sebagian besar sumber daya dialokasikan oleh penguasa dengan kebijakan yang berbeda, bukan oleh kekuatan pasar (Diego Restuccia n.d.).

Tren pertumbuhan ekonomi pada puncaknya di tahun 2013 hingga kuartal pertama tahun 2020 menunjukkan penurunan hingga 86%. Kemudian kondisi ini menggambarkan bahwa Venezuela mengalami krisis terburuk yang pernah ada di Amerika Latin (Emmanuel dkk. 2020). Penurunan pertumbuhan ekonomi diikuti oleh anjloknya standar hidup masyarakat hingga 74% antara tahun 2013 dan 2023. Ini setara dengan buruknya standar hidup di negara-negara rentan peperangan dan perang saudara seperti Irak, Lebanon, dan Liberia (Frank Muci 2024).

Mantan presiden Hugo Chávez dan Presiden Nicolás Maduro melakukan kesalahan fatal dengan membentuk kebijakan ekonomi makro dan mikro yang keliru. Terlebih selama tahun 2000-an hingga awal tahun 2010 ketika perekonomian Venezuela sedang mengalami pertumbuhan pesat pada periode “siklus super” komoditas global, termasuk minyak mentah (Frank Muci 2024). Pengeluaran pemerintah selama masa kejayaan minyak mentah lebih tinggi dari pendapatan negara. Pemerintah juga melonggarkan tarif pajak dan memberikan subsidi besar besaran untuk bensin hingga listrik. Setiap tahun sekitar 100.000 barel bensin bernilai 10 miliar dolar diselundupkan ke Kolombia dan Brasil untuk dijual kembali dengan harga yang lebih kompetitif (Girish Gupta 2016).

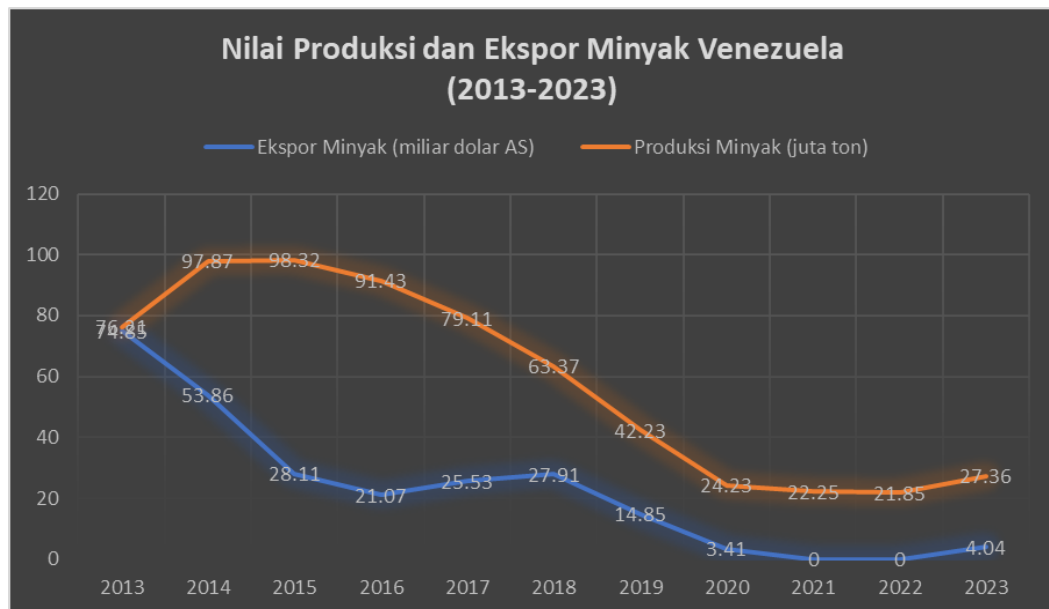
Kemudian, subsidi listrik diperkirakan menghabiskan anggaran lebih dari setengah defisit fiskal yaitu sekitar 10% dari total PDB. Akibatnya, industri ini kekurangan dana investasi karena dikelola buruk oleh teknisi yang merupakan sekutu politik. Pemerintahan Chávez dan Maduro mengambil kendali penuh atas

pasar, memusuhi swasta dan bisnis perorangan, menasionalisasi jutaan sektor lahan dan beberapa bisnis di bidang manufaktur, perbankan, ritel, hingga pertanian yang berdampak pada kelumpuhan kegiatan perekonomian non-minyak. Secara keseluruhan, kebijakan anti pasar ini mengganggu produksi domestik dan membuat Venezuela bergantung pada impor (Frank Muci 2024).

Pada periode ini, satu persatu indikasi kasus korupsi mulai menjadi problematika serius. Venezuela diperkirakan mengalami kerugian sebesar 300 miliar dolar akibat korupsi melalui skema mata uang asing dan strategi lainnya (Eyanir China dkk. 2016). Laporan keuangan perusahaan PdVSA tahun 2015 semakin memperjelas tindakan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah. Sepanjang tahun 2013, pendapatan perusahaan minyak nasional PdVSA yang kian menurun menyebabkan perekonomian nasional anjlok (Barredo dan Feliciano 2025). Venezuela terpaksa menaikkan pinjaman luar negeri enam kali lipat dengan membebani perusahaan minyak milik negara sebesar lebih dari 100 miliar dolar dalam bentuk obligasi. Kondisi perekonomian diperparah dengan keputusan pemerintah untuk mencetak uang dari bank sentral setelah melumpuhkan independensinya. Strategi ini ditujukan untuk memperbaiki defisit anggaran, namun di satu sisi sangat bersifat inflasioner (Frank Muci 2024).

Venezuela mengalami inflasi yang tidak terkendali sejak 2015. Pada tahun tersebut, inflasi menembus angka 121,74%. Laju inflasi semakin melonjak dan meraih angka tertinggi mencapai 63.374,08% pada tahun 2018 dan menetapkan status ekonomi Venezuela menjadi kasus hiperinflasi (Statista n.d). Kondisi ekonomi diperparah oleh penurunan produksi dan nilai ekspor minyak yang konstan dari tahun ke tahun.

**Grafik 1. Nilai produksi dan ekspor minyak Venezuela (2013-2023)**



Sumber: TradeImeX (2024)

Walaupun laju inflasi mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, bukan berarti memberikan sinyal yang positif untuk perekonomian negara tersebut, sebab Venezuela masih dihantui oleh sanksi minyak yang dijatuhkan Amerika Serikat. Situasi negara yang semakin tidak menentu mendorong eksodus besar-besaran penduduk Venezuela ke negara-negara tetangga. Sekitar 8 juta penduduk Venezuela melarikan diri dari negaranya. Sebagian besar mencari suaka di kawasan Amerika Latin dan Karibia, yaitu mencapai lebih dari 6,5 juta jiwa. Kolombia menampung pengungsi terbanyak, yaitu sekitar 3 juta jiwa (UNHCR 2024). Imigran mengeluhkan kurangnya kesempatan kerja di negara tujuan migrasi, hingga masalah ketidaksetaraan hak dan kualitas layanan publik (Emmanuel dkk. 2020). Dinamika migrasi menimbulkan masalah baru dalam penyelesaian problematika ekonomi politik Venezuela. Negara Bolivar ini mendapat kecaman dari dunia internasional, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara lainnya di kawasan Amerika Latin.

Pada tahun 2019, Amerika Serikat mengerahkan kampanye “tekanan maksimum” untuk menggulingkan presiden Nicolás Maduro dan mengakui Juan Guaidó sebagai presiden sah Venezuela (Frank Muci 2024). Namun, pergantian pemerintahan ini tidak membuahkan hasil. Alih alih fokus pada perbaikan kondisi negara pasca Maduro, kelompok oposisi justru lebih mahir melobi Washington. Mereka bahkan menambah kasus skandal korupsi yang berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat sipil terhadap oposisi. Masyarakat menganggap bahwa oposisi lebih tertarik untuk menggulingkan Maduro daripada memperbaiki krisis. Amerika Serikat turut meyakinkan masyarakat bahwa upaya ini sama sekali tidak akan menciptakan demokrasi sejati. Hasilnya, pada 30 Desember 2019, presiden sementara Guaidó diturunkan dari jabatannya atas keputusan Majelis Nasional Venezuela. Keputusan ini menjadi akhir dari upaya Amerika Serikat untuk memperbaiki kondisi krisis Venezuela melalui dukungan komunitas internasional (Global Americans 2023).

Upaya pemulihan demokrasi oleh Amerika Serikat diikuti oleh penerapan sanksi terhadap Venezuela dan perusahaan minyak milik negara PdVSA, berdasarkan EO 13808. Sanksi tersebut berupa pembekuan aset Venezuela di Amerika Serikat dan memutus aksesnya ke pasar minyak Amerika Serikat (US Department of State n.d.). Selain itu, Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi sekunder terhadap PdVSA. Artinya, semua negara yang melakukan transaksi dengan perusahaan minyak nasional ini juga akan dikenakan sanksi (Frank Muci 2024).

Ada banyak kerugian yang dialami oleh Venezuela sejak Amerika Serikat menjatuhkan sanksi. Mulai dari kerugian ekonomi, hingga menciptakan masalah

akar rumput. PBB menegaskan, sanksi telah memperburuk dampak krisis ekonomi dan memperparah kondisi kemanusiaan (UN 2019). IMF juga membenarkan bahwa krisis Venezuela menjadi sejarah krisis terburuk dalam sejarah Amerika Latin modern, diperparah oleh penerapan sanksi (Redacción El Estímulo 2019).

Sejak dijatuhkannya sanksi minyak pada Januari 2019, PdVSA menjual minyak mentah di pasar formal dengan harga diskon besar-besaran hingga 40% per barel untuk menghindari pembatasan. Pada tahun tersebut produksi minyak mentah menurun drastis, yaitu hanya mencapai 350.000 bph (Caracas Chronicles 2025). Sebelumnya produksi minyak mentah pernah mencapai angka tertinggi hingga 3,2 juta bph pada tahun 2000 (EIA 2023). Lalu, mulai turun menjadi 1 juta bph pada tahun 2018 yang dipicu oleh kesalahan manajemen Chavista oleh pemerintahan Maduro. Kebijakan pemadaman listrik nasional pada tahun 2019 juga berkontribusi lebih dari 300.000 bph dalam penurunan produksi minyak mentah Venezuela (Caracas Chronicles 2025).

Penurunan produksi minyak membatasi arus mata uang asing masuk ke Venezuela. Berkurangnya aktivitas perdagangan internasional berakibat pada kontraksi impor kebutuhan mendesak, seperti makanan dan obat-obatan yang pada akhirnya merugikan kelompok masyarakat rentan. Federasi farmasi Venezuela mengungkapkan 30% obat-obatan dan 90% persediaan yang mereka gunakan diimpor, serta hampir 75% makanan yang dikonsumsi masyarakat merupakan hasil impor (Luis Oliveros 2020).

Anggota rezim terus mengupayakan adaptasi terhadap sanksi agar tetap mendapatkan pemasukan luar negeri dan terus terlibat dalam transaksi keuangan, sementara masyarakat Venezuela terbelenggu dalam apa yang disebut sebagai

“kepatuhan yang berlebih”. Masyarakat dan LSM tidak memiliki manuver yang kuat untuk dapat merespon langsung dampak sanksi. Akses yang terbatas ke bank internasional menunda proses transfer dana dan menghambat penerimaan bantuan luar negeri, serta berakibat pada penutupan rekening massal. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sipil, perusahaan swasta dan LSM juga mengalami hambatan kinerja (Maryhen Jiménez 2020).

Penerapan sanksi telah memperkuat informalisasi dan kriminalisasi ekonomi. Perusahaan swasta mengeluhkan mahal dan sulitnya menjalankan usaha di sektor formal, sehingga memaksa mereka untuk memanfaatkan instrumen keuangan yang berbeda seperti kripto dan dolarisasi informal, atau bahkan beralih ke sektor informal. Ini terjadi karena pemerintah Venezuela secara masif menaikkan tarif pajak dan menghapus undang-undang yang menguntungkan swasta untuk menutupi kekurangan pendapatan negara (Bull and Rosales 2020). Sanksi juga beresiko mengakibatkan Venezuela kehilangan aset di luar negeri. Deutsche Bank dan Citibank pada Juli 2019 telah menyita emas senilai 1,4 miliar dolar dari Banco Central de Venezuela (BCV) sebagai jaminan akibat dijatuhkannya sanksi terhadap bank sentral tersebut (Reuters 2020).

Sanksi tak hanya berdampak pada penurunan produksi minyak mentah. Aktivitas impor minyak dari Venezuela ke Amerika Serikat pun ikut menurun. Dari sekitar 1,3 juta bph pada tahun 2001 menjadi kisaran 510.000 bph pada tahun 2018. Pada tahun 2019 Amerika Serikat memberlakukan kebijakan ekstrem, yaitu penghentian impor minyak selama empat tahun hingga tahun 2022. Kemudian, melanjutkan kembali aktivitas impor dalam skema keringanan sanksi terbatas mulai Januari 2023 (EIA 2023). Kesepakatan ini dibentuk setelah adanya negosiasi antara

Maduro dengan oposisi pada November 2022. *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) mengizinkan transaksi tertentu dengan menerbitkan *General License* (GL) 41 yang memungkinkan perusahaan minyak Chevron untuk melanjutkan produksi minyak dan melakukan ekspor impor minyak di perusahaan patungannya di Venezuela (Seelke dkk. 2025). Pada periode tersebut, impor minyak ke Amerika Serikat meningkat hingga 153.000 bph per bulan Juli 2023. Keringanan sanksi mempermudah Venezuela dalam mengimpor bahan pengencer untuk keperluan memproses minyak berat yang diperkirakan akan meningkatkan produksi (EIA 2023).

Pada 17 Oktober, Maduro dan oposisi menandatangani Perjanjian Barbados, yang memuat kesepakatan untuk menyeimbangkan persaingan melalui reformasi elektoral pada pemilihan umum 2024 (International Crisis Group 2023). Setelah perjanjian ini dibentuk, OFAC menerbitkan GL 43 yang berisi perizinan transaksi dengan Minerven dan GL 44 yang berisi perizinan transaksi dengan perusahaan manapun yang terlibat dalam sektor minyak dan gas selama 6 bulan. Akan tetapi, pada 29 Januari 2024 OFAC mencabut GL 43 (Bradley T. Smith 2024), dan pada April 2024, Biden mengumumkan tidak akan memperbarui perizinan di sektor minyak karena Maduro dianggap melanggar Perjanjian Barbados (OFAC 2024).

Pada 4 Maret 2025 OFAC meminta Chevron untuk menghentikan operasinya di Venezuela selambat-lambatnya pada 27 Mei 2025 melalui mengamandemen GL (Seelke dkk. 2025). Kemudian, pada April 2024 Biden membiarkan GL 44 berakhir yang mengisyaratkan berakhirnya keringanan sanksi melalui Perjanjian Barbados (Cambridge 2024). Mulai 2 April 2025, Amerika

Serikat memberlakukan tarif 25% untuk setiap negara yang mengimpor barang ke Amerika Serikat apabila negara tersebut terindikasi membeli minyak dari Venezuela, baik melalui Venezuela langsung ataupun melalui pihak ketiga. Tarif tersebut akan dihentikan 1 tahun setelah tanggal terakhir negara tersebut mengimpor minyak dari Venezuela (The White House 2025).

Sanksi yang semakin diperketat menutup pasar ekspor Venezuela ke Amerika Serikat, namun memunculkan strategi alternatif bagi pemerintah Venezuela untuk mengganti pasar ke Tiongkok (Chatham House 2025). Ini sekaligus membuka pintu bagi koalisi negara-negara yang dikenai sanksi seperti Tiongkok untuk semakin memperkuat posisi di Amerika Latin dan Karibia, sekaligus menjadi gambaran kecil persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan tersebut (Atlantic Council 2025).

## **2.2 Dominasi Tiongkok di Amerika Selatan dan Kerja Sama Perdagangan Minyak Venezuela-Tiongkok**

Selama dua dekade terakhir, Tiongkok semakin memperluas pengaruh ekonominya di kawasan Amerika Selatan dengan membentuk strategi kekuatan ekonomi melalui berbagai upaya. *Pertama*, melalui perdagangan. Perdagangan Tiongkok–Latin America and Caribbean (LAC) melonjak dari \$12 miliar pada tahun 2000 menjadi \$482 miliar pada tahun 2022 dan membuat Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar kedua di LAC. *Kedua*, melalui Belt and Road Initiative (BRI). Sebanyak 22 negara LAC telah bergabung dalam BRI, dengan nilai pembiayaan infrastruktur Tiongkok yang diperkirakan telah melampaui 1 triliun dolar secara global. *Ketiga*, melalui pinjaman. Pinjaman memuncak sebesar 35,1

miliar dolar pada 2010. *Keempat*, melalui investasi. Investasi langsung Tiongkok ke LAC mencapai 148 miliar dolar antara tahun 2005 hingga 2022 (Johnston 2025). Di Kolombia, Tiongkok banyak melakukan investasi di bidang strategis seperti energi, infrastruktur, dan pertanian (Zhou 2025). Di Guyana, Tiongkok memberikan banyak pinjaman untuk proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jembatan dan perluasan Bandara (Ray dkk. 2024).

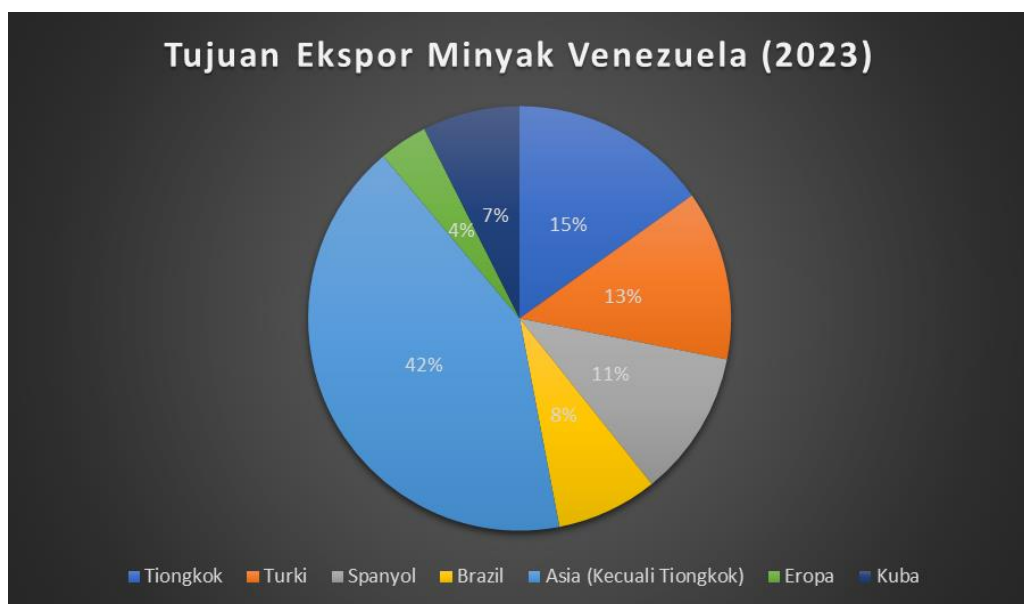
Tekanan maksimum terhadap pemerintahan Maduro ditunjukkan Trump dalam pencabutan GL 8 pada April 2020 yang berarti pencabutan izin segala bentuk transaksi oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dengan perusahaan minyak Venezuela PdVSA. Setelah pencabutan GL tersebut, China National Petroleum Corporation (CNPC) Tiongkok yang sebelumnya sudah menjadi mitra PdVSA melalui perusahaan *joint venture* Petrolera Sinovensa memperluas peran dalam sektor minyak Venezuela (Atlantic Council 2025). Dilaporkan, pada tahun 2021 CNPC mengirimkan teknisi dari Tiongkok (Zerpa 2021). Dilaporkan, bahan bakar mineral, minyak, dan produk distilasi menjadi komoditas terbesar yang diimpor Tiongkok dari Venezuela. Pada tahun 2024, nilai ekonominya mencapai 1,05 miliar dolar (Trading Economics n.d.).

Indikasi pergeseran ekspor minyak Venezuela ke Tiongkok pasca sanksi AS tercermin dari sejumlah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. PdVSA telah menandatangani setidaknya sembilan kontrak baru dengan penyedia layanan asing, termasuk dua perusahaan Tiongkok sebagai langkah untuk mempertahankan pemasukan dolar setelah diberlakukannya sanksi (Bloomberg 2025). Selain itu, PdVSA dengan bantuan Tiongkok melakukan restrukturisasi operasi transportasi

dan logistik perusahaan untuk mengekspor minyak mentah pasca sanksi AS (Atlantic Council 2025).

Tiongkok menjadi tujuan ekspor utama minyak Venezuela dari tahun ke tahun sejak Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap sektor minyak. Pada tahun 2023, Tiongkok menyumbang 16,3% ekspor minyak Venezuela dan menjadikannya mitra dagang utama.

**Diagram 1. Tujuan Ekspor Minyak Venezuela (2023)**



Sumber: TradeImeX (2024)

Setelah Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengenakan tarif sebesar 25% terhadap seluruh barang impor ke Amerika Serikat dari negara-negara pembeli minyak Venezuela pada 2 April 2025, Tiongkok konsisten menjadi pembeli terbesar, menyumbang porsi signifikan sekitar 503.000 bph dilaporkan pada awal tahun 2025, diikuti oleh Amerika Serikat, Spanyol, India, Kuba, Brasil, hingga Turki (Deringer 2025). Pada Mei 2025, Tiongkok menerima sekitar 584.000 bph atau 75% dari total ekspor, lebih tinggi dari bulan April sekitar 521.000 bph (BOE Report 2025). Penerimaan Tiongkok naik menjadi 90% dari total ekspor pada

bulan Juni, baik secara langsung maupun melalui pusat transshipment (Reuters 2025).

Pengiriman minyak Venezuela ke Tiongkok juga dilakukan dengan menyamarkan identitas minyak. Sebagai contoh, perusahaan pertahanan Tiongkok China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) terlibat dalam jaringan kapal tanker bayangan yang digunakan untuk menyalurkan minyak mentah Venezuela secara ilegal selama kampanye tekanan maksimum Amerika Serikat (Reuters 2021). Tiongkok menjadi mitra sentral minyak Venezuela sejak jaringan gelap tersebut mulai beroperasi. Bahkan menerima hampir seluruh ekspor yang dijual dengan harga diskon dan disamarkan menjadi minyak Malaysia (Atlantic Council 2025).

Pengiriman bitumen Malaysia meningkat 13 kali lipat pada Mei 2020 hingga Juni 2021, yang menurut Vortexa Analytics 90% kargo sebenarnya merupakan minyak mentah Venezuela (Joseph Webster dkk. 2024). Minyak mentah mengalir ke Tiongkok melalui dukungan unit Rosneft yang berbasis di Swiss, perusahaan minyak milik negara Rusia. Dengan memanfaatkan skema pengiriman yang kompleks, minyak tersebut seolah-olah berasal dari Malaysia (Focus Malaysia 2020).

Selama satu dekade, Malaysia memainkan peran penting dalam ekspor bitumen Venezuela menuju Tiongkok. Sejak 2019, Malaysia memonopoli pengiriman kargo bitumen dengan menerbitkan sertifikat asal Malaysia untuk menghindari pembatasan fiskal dan sanksi Amerika Serikat. Menurut data GAC 2024, ekspor bitumen campuran Malaysia merosot dari 736.249 mt pada Juli menjadi 152.227 mt pada Agustus, lalu hilang sepenuhnya pada September. Di saat

yang sama, Brasil menyalip posisi Malaysia menjadi pemasok global utama. Pada Juli 2024, Brasil mulai memasok 108.299 mt bitumen campuran, lalu meningkat tajam menjadi 768.853 mt pada September 2024, sekitar 72,7% dari total impor Tiongkok bulan itu (Energy News 2024).

Senilai lebih dari 1 miliar dolar minyak Venezuela telah dilabeli sebagai minyak Brasil pada tahun 2024 (Aizhu 2025). Berdasarkan data maritim, citra satelit, dan dokumentasi visual pesisir yang dianalisis oleh layanan pemantauan TankerTrackers.com, sejumlah perusahaan pelayaran didapati memanipulasi sinyal lokasi kapal tanker agar terlihat seolah-olah berangkat dari pelabuhan Brasil, padahal sebenarnya berasal dari Venezuela. Praktik ini dikenal sebagai *spoofing*. Data bea cukai Tiongkok menunjukkan bahwa antara Juli 2024 hingga Maret 2025, Tiongkok mengimpor sekitar 2,7 juta mt bitumen campuran dari Brasil, setara 67.000 barel per hari, dengan nilai perdagangan mencapai 1,2 miliar dolar AS (Aizhu 2025).

Kenaikan volume pengiriman ke Tiongkok mengimbangi penurunan drastis ekspor ke Amerika Serikat dan Eropa akibat pencabutan izin ekspor oleh Washington. Pasca berakhirnya izin ekspor khusus oleh Departemen Keuangan dan Luar Negeri AS pada Maret 2025, pembeli tradisional PdVSA di AS dan Eropa mengurangi pesanan secara signifikan dengan batas waktu pengiriman terakhir pada 27 Mei 2025 (Reuters 2025). Meskipun ekspor ke dua kawasan tersebut menurun, perantara meningkatkan pengiriman ke Tiongkok, sehingga total ekspor tetap stabil. Pada Mei 2025, PDVSA mencatat rata-rata ekspor 779.000 barel per hari, hampir setara dengan April, yaitu 783.000 barel per hari. Dengan Tiongkok menyerap 584.000 barel per hari (Martinez 2025). Pengiriman minyak langsung

dan tidak langsung ke Tiongkok menyumbang sekitar 95% total ekspor, menjadikannya pembeli utama minyak Venezuela (Reuters 2025).

Pada tahun 2016, sejumlah 18 proyek produksi minyak telah dikembangkan oleh Venezuela dan Tiongkok yang besaran investasinya mencapai 5 miliar dolar AS. Per Februari 2017, kedua negara telah menandatangani 790 perjanjian kemitraan di bidang strategis, menyusul persetujuan Tiongkok terhadap pembiayaan proyek di Orinoco Mining Arc senilai 700 juta dolar AS (PSUV 2017). Sejak kematian Presiden Hugo Chávez, Venezuela telah menjadi pemasok terbesar keempat minyak ke Tiongkok dan menjadi mitra dagang terbesar kelima. Ini berarti Tiongkok memiliki peran besar dalam kestabilan perekonomian Venezuela (Ríos 2013).

### **BAB 3**

#### **ANALISIS *BANDWAGONING***

Venezuela terletak di bagian utara Amerika Selatan, berbatasan dengan Laut Karibia di sebelah utara, Guyana dan Samudra Atlantik di Timur, Brasil di Selatan, dan Kolombia di Barat (UNDP n.d.). Negara ini menjadi salah satu pemain penting di pasar energi, terutama karena cadangan minyaknya yang melimpah (Delgado 2024), dengan Amerika Serikat sebagai negara penerima ekspor terbesar pada periode sebelum sanksi. Dalam periode sanksi, Tiongkok semakin memperkuat posisi strategisnya di Venezuela, menggandeng perusahaan minyak nasional PdVSA dan menjadi mitra perdagangan minyak utama negara Bolivar. Selain itu, krisis ekonomi dan demokrasi yang dialami Venezuela telah mengubah tatanan regional dan menciptakan ketegangan di kawasan Amerika Latin.

#### **3.1 Tingkat Keparahan Ancaman (Perilaku Venezuela terhadap Tiongkok)**

Pada tahun-tahun awal kepemimpinan Chávez, Venezuela berbalik arah dalam hubungan internasionalnya, bertransformasi dari negara yang secara luas berpihak pada Amerika Serikat dan aktif memperjuangkan norma-norma demokrasi di Belahan Barat menjadi negara yang semakin otoriter dan secara aktif mengupayakan hubungan yang lebih erat dengan negara-negara otoritis seperti Kuba, Libya, Rusia, dan Tiongkok dalam sikap yang secara terbuka antagonis terhadap kebijakan AS di kawasan tersebut (Creutzfeldt dan Alvarado 2024).

Pasca Amerika Serikat menjatuhkan sanksi, Tiongkok muncul sebagai tokoh utama dalam aktivitas ekspor minyak Venezuela. Tiongkok yang sudah lama

mengantongi perjanjian utang dengan Venezuela dengan mudah mengambil posisi Amerika Serikat di negara tersebut. Selama kurang lebih satu abad, Amerika Serikat menjadi mitra dagang utama Venezuela. Namun, sejak pertengahan 2000-an, negara Amerika Selatan tersebut mulai mengalihkan kemitraannya ke Tiongkok, dengan fokus utama tetap pada perdagangan minyak (Dialogue Earth 2016). Selama beberapa dekade terakhir, Tiongkok merupakan kreditor terbesar bagi Venezuela, yang mana Venezuela menerima lebih banyak pinjaman daripada negara lain di Amerika Latin. Bagi Tiongkok, Venezuela menjadi gerbang menuju pasar Amerika Selatan sekaligus sarana untuk menjamin pasokan minyak dari negara dengan cadangan minyak mentah terbesar di dunia ((Rosales dan Shaw 2023).

Sejak tahun 2007 hingga 2016, Tiongkok melalui CDB dan ICBC telah menyalurkan lebih dari US\$ 60 miliar pinjaman kepada Venezuela dengan skema pembayaran menggunakan ekspor minyak mentah. Berdasarkan perjanjian, Venezuela diwajibkan mengekspor sekitar 430.000 barel minyak per hari ke Tiongkok (Sanderson dan Forsythe 2012). Namun, data tahun 2011 menunjukkan adanya ketidaksesuaian, di mana dari Januari hingga Maret Venezuela seharusnya mengirimkan 37,7 juta barel, tetapi hanya mampu mengekspor sekitar 21,1 juta barel. Kesenjangan ini erat kaitannya dengan menurunnya kapasitas produksi minyak nasional (Alamsyah dkk. 2021). Jauh sebelum Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Venezuela, Tiongkok sudah lebih dulu memiliki akses dalam mempengaruhi alur perekonomian negara itu. Kegagalan pembayaran utang pada tahun 2011 semakin memperbesar kendali Tiongkok atas Venezuela, namun ini masih mengindikasikan ancaman ekonomi politik dan berskala **rendah**.

Berbeda dengan kreditor berbasis pasar yang umumnya menginginkan jaminan kebijakan jangka pendek untuk memperoleh imbal hasil finansial dalam waktu dekat, kreditor Tiongkok cenderung mendorong peluang komersial jangka panjang melalui pengikatan investasi pada kontrak terjamin bagi perusahaan milik negara, persyaratan penggunaan komponen asal Tiongkok untuk mendorong ekspor mesin, atau jaminan dalam bentuk komoditas seperti minyak (Kaplan 2016).

Skema perjanjian pinjaman untuk minyak terdiri atas dua kontrak yang terpisah. Pertama, terdapat perjanjian finansial di mana bank kebijakan Tiongkok memberikan pinjaman kepada pemerintah negara-negara Amerika Latin. Kedua, terdapat perjanjian komersial yang mengatur pembelian minyak oleh importir Tiongkok dari PdVSA, perusahaan minyak negara Venezuela. Perjanjian komersial ini berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, di mana PdVSA menggunakan pendapatan harian dari penjualan minyak ke Tiongkok untuk secara bertahap melunasi kewajiban pinjaman kepada bank kebijakan Tiongkok hingga jatuh tempo. Dengan kata lain, pinjaman yang diberikan oleh bank kebijakan kepada pemerintah nasional dijamin melalui arus pendapatan harian dari minyak yang dihasilkan oleh perusahaan minyak milik negara (Kaplan dan Penfold).

Jaminan penjualan minyak dari Venezuela ke Tiongkok bergantung pada perusahaan minyak nasional PdVSA yang memproduksi dan mengirimkan minyak. Ironisnya, sistem ini bisa mengancam stabilitas PdVSA karena strategi pinjaman Tiongkok memaksa perusahaan tersebut untuk mengalokasikan sebagian besar pendapatan demi membayar utang dari pada diinvestasikan kembali ke perusahaan (Jackson 2024).

Selain dalam bentuk pinjaman, keterlibatan Tiongkok juga terwujud melalui investasi langsung di sektor energi Venezuela. Pada 2010, CNPC menjalin usaha patungan dengan PdVSA dengan mengakuisisi 40 persen hak atas Blok Junin-4 di Sabuk Orinoco (Alamsyah dan Wiranata 2021). Pada tahun 2012, Tiongkok dan Venezuela menyepakati pembangunan kilang minyak senilai US\$ 10 miliar di Provinsi Guangdong, Tiongkok, dengan kapasitas pemurnian 400.000 barel minyak mentah Venezuela per hari. Struktur kepemilikan saham ditetapkan sebesar 60 persen untuk CNPC dan 40 persen untuk PdVSA. Meskipun awalnya dijadwalkan mulai beroperasi pada 2014, proyek ini mengalami penundaan berulang. Ketidakmampuan PdVSA untuk menanggung kewajiban finansial atas porsi sahamnya akhirnya menyebabkan pembatalan kemitraan pada 2018. Sebagai kompensasi, perusahaan-perusahaan Tiongkok kemudian menuntut diskon harga minyak mentah guna menutupi biaya transportasi dan penyulingan (Bull dan Rosales 2024). Kepemilikan Tiongkok atas 40 persen saham Blok Junin-4 dan 60 persen pada kilang minyak bersama PdVSA menunjukkan dominasi ekonominya atas Venezuela. Gagalnya PdVSA memenuhi porsi saham pada 2018 yang berujung pada pembatalan kerja sama semakin menegaskan lemahnya posisi Venezuela. Tekanan ini merupakan ancaman berskala **rendah**.

Sejak September 2017, Venezuela tidak lagi membayar obligasi. Negara tersebut tercatat gagal membayar 16 obligasi beserta kupon dengan nilai keseluruhan mencapai 1,81 miliar dolar AS pada tahun yang sama (Bloomberg 2017). Tiongkok mulai menunjukkan kehati-hatian terhadap Venezuela, terlihat pada Desember 2017 ketika Sinopec menggugat PdVSA di Amerika Serikat terkait kontrak 23,7 juta dolar AS yang gagal dipenuhi. Walaupun nilainya lebih kecil

dibanding utang Venezuela sekitar 62 miliar dolar AS, sanksi Amerika Serikat dan beban utang membuat rezim Maduro tetap membutuhkan pendanaan tambahan dari Tiongkok (Rendon dan Baumunk 2018). Dari kondisi tersebut tampak bahwa ketergantungan ekonomi Venezuela terhadap Tiongkok semakin meningkat. Tekanan sanksi Amerika Serikat mendorong Venezuela untuk beralih mencari dukungan dari kekuatan besar lain, meskipun Tiongkok sendiri menunjukkan indikasi yang berpotensi mengancam posisi Venezuela, akan tetapi kondisi ini menunjukkan bahwa Venezuela masih memiliki ruang manuver untuk bekerja sama dengan negara lain yang menjadikan ancaman masih berskala **rendah**.

Meski ragu terhadap keberlanjutan kemitraan ekonomi dengan Venezuela, pada puncak krisis negara tersebut, Tiongkok tetap memberikan dukungan melalui pinjaman baru serta penandatanganan 28 perjanjian bilateral. Dalam kunjungan Nicolas Maduro ke Beijing pada 17 September 2018, Tiongkok menyetujui pemberian pinjaman sebesar 5 miliar dolar AS guna memperkuat sektor minyak Venezuela. Selain itu, kunjungan tersebut menandai komitmen Venezuela untuk bergabung dengan Belt and Road Initiative (BRI), sekaligus menunjukkan sikap Tiongkok yang tetap mendukung Venezuela di tengah tekanan internasional akibat krisis domestiknya (Alamsyah dan Wiranata 2021).

Antara tahun 2010 dan 2018, Tiongkok telah mengembangkan sejumlah proyek infrastruktur di Venezuela, di antaranya, jalan, jembatan, sekolah, bandara, rumah sakit, pelabuhan, proyek perumahan, hingga pembangkit listrik tenaga air. Dari tahun 2008 hingga tahun 2020, Venezuela menyumbang sekitar 29,6% dari total proyek kontrak yang dikembangkan oleh Tiongkok di Amerika Latin. Angka ini jauh lebih besar dari sumbangan negara-negara lain di kawasan, seperti Brasil

13,9%, Argentina 10,7%, Ekuador 7,5%, Meksiko 6,7%, Kolombia 6,2%, dan Peru 4,2%. (Guo 2023). Pada tahun 2018, ketika ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela meningkat, skala ancaman dari Tiongkok berada pada kategori **rendah**, yang mana meskipun Venezuela bukan mitra ekonomi yang sepadan, Tiongkok tetap memberikan dukungan kepada negara Petro tersebut, tentunya disertai dengan motif politik dan ekonomi tersendiri.

Krisis ekonomi dan politik yang semakin memburuk menyebabkan Venezuela gagal memenuhi kewajiban pasokan minyak guna melunasi utang dan memenuhi ekspektasi pembiayaan proyek. Produksi minyak tahunan menurun setelah Venezuela mengalami krisis ekonomi pada tahun 2018, menciptakan eksodus besar-besaran hingga lebih dari 7,7 juta penduduk meninggalkan Venezuela pada Mei 2024. Fenomena ini berpengaruh terhadap penurunan jumlah tenaga kerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor energi (UNHCR 2025). Tekanan pada industri minyak semakin kompleks akibat sanksi ekonomi Amerika Serikat. Produksi minyak anjlok ke titik terendah dalam 70 tahun terakhir. Pada tahun 2023, produksi minyak hanya berkisar 742.000 bph, turun 70% dari jumlah produksi pada tahun 2013 (Investopedia 2025).

Walaupun CNPC masih melakukan perdagangan dengan Venezuela setelah larangan ekspor minyak pada Januari 2019, pada Agustus 2019 perusahaan itu menghentikan seluruh pengiriman minyak Venezuela. Keputusan ini diambil segera setelah Amerika Serikat memperketat sanksinya dengan melarang transaksi dengan pemerintah Venezuela serta mengancam mitra asing dengan sanksi sekunder (Rodríguez 2022). Ini berpengaruh signifikan terhadap melemahnya ekspor minyak Venezuela pada akhir tahun 2019 (Samberg 2021).

Ketidakmampuan Venezuela dalam memenuhi kewajiban pasokan minyak berdasarkan perjanjian utang, disertai dengan penghentian impor minyak oleh CNPC menjadi pukulan telak bagi perekonomian negara tersebut. Kendati demikian, Tiongkok tidak merespons melalui ancaman militer, melainkan menekan melalui mekanisme perjanjian utang yang mengindikasikan bahwa bentuk ancaman yang muncul berada pada skala **rendah**.

Disisi lain, Venezuela menjadi tempat persaingan dua kekuatan besar, Tiongkok dan Amerika Serikat. Saat Amerika Serikat mengakui deklarasi oposisi Juan Guaido, Tiongkok menekankan bahwa Venezuela harus menyelesaikan persoalannya tanpa campur tangan asing. Pada 24 Januari 2019, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, menyatakan bahwa Tiongkok konsisten memegang prinsip non-intervensi serta menolak segala bentuk intervensi asing terhadap Venezuela (Alamsyah dan Wiranata 2021). Dalam peristiwa tersebut, Tiongkok memperlihatkan sikap non-intervensi yang turut menciptakan keseimbangan pengaruh asing dalam dinamika politik Venezuela.

Selain itu, penguatan posisi Tiongkok sebagai kekuatan hegemon di Amerika Selatan juga tampak pada meningkatnya ketergantungan ekonomi Kolombia dan Guyana. Dalam konteks ini, perlu dianalisis bagaimana perluasan pengaruh Tiongkok di dua negara tersebut turut membentuk dinamika kawasan yang memengaruhi perilaku Venezuela terhadap Tiongkok. Di Kolombia, Pada tahun 2024, nilai perdagangan dengan Tiongkok mencapai US\$21 miliar, menempatkan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar kedua bagi Kolombia, dengan berbagai perjanjian dan investasi strategis yang terus memperkuat kerja sama di bidang energi, infrastruktur, dan pertanian (Zhou 2025). Dalam sektor

energi, Tiongkok melalui POWERCHINA terlibat dalam pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tepuy 108 megawatt (PowerChina 2024).

Di Guyana, Tiongkok memberikan banyak pinjaman untuk proyek infrastruktur besar seperti Penyeberangan Sungai Demerara dan perluasan Bandara Cheddi Jagan. Berdasarkan hubungan tersebut, kedua negara menandatangani Nota Kesepahaman untuk membentuk Kelompok Kerja Kerja Sama Investasi dan Ekonomi yang mencakup sektor infrastruktur, pertanian, energi, kesehatan, dan pendidikan (Ray dkk. 2024).

Dari pola tersebut, terlihat bahwa keterlibatan Tiongkok di Kolombia dan Guyana bukan sekedar mencerminkan ekspansi ekonomi, tetapi juga menunjukkan perubahan struktur hegemoni di kawasan. Keterlibatan kedua negara dalam pembiayaan dan proyek Tiongkok menunjukkan bahwa Beijing kian memiliki ruang untuk memengaruhi arah kebijakan di kawasan. Kondisi ini menciptakan tekanan regional bagi Venezuela dalam menentukan mitra strategisnya, sehingga kedekatan Venezuela dengan Tiongkok tidak lagi sekadar pilihan ekonomi, melainkan bagian dari dinamika di kawasan.

Yang terbaru, sebuah perusahaan swasta asal Tiongkok telah memulai kegiatan eksploitasi pada dua ladang minyak di Venezuela dan merencanakan investasi lebih dari 1 miliar dolar AS melalui skema kontrak bagi hasil selama 20 tahun yang ditandatangani pada 2024 (Reuters 2025). Kendati proyek tersebut memberikan keuntungan ekonomi timbal balik, Maduro tetap mengalami isolasi di kancah internasional, sementara sikap Tiongkok terhadap kehadiran militer Amerika Serikat merepresentasikan pesan geopolitik yang signifikan di tingkat

global (Blanco 2025). Ketegangan antara dua kekuatan besar di negara Bolivar yang mencerminkan adanya upaya perebutan pengaruh menimbulkan ancaman tersendiri bagi Venezuela. Namun, negara tersebut tetap mampu mempertahankan otonomi strategisnya tanpa kehilangan kedaulatan, sehingga tingkat ancaman yang muncul masih tergolong **rendah**.

Meskipun begitu, pengalokasian dana oleh pemerintah untuk membayar utang ke Tiongkok mengorbankan sumber daya penting, baik bagi keberlangsungan operasional PdVSA maupun untuk kebutuhan impor serta pasokan esensial bagi perekonomian dan masyarakat Venezuela (Blanco 2025). Perjanjian utang dengan Tiongkok menempatkan Venezuela dalam ketergantungan yang signifikan, memperkuat posisi vital Tiongkok dalam perekonomian negara Bolivarian tersebut.

Isu mengenai argumentasi bahwa diplomasi "jebakan utang" merupakan instrumen kekuatan ekonomi global Tiongkok telah menarik perhatian publik internasional. Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, menganggap bahwa Tiongkok melakukan "diplomasi utang" untuk memperluas pengaruh geopolitiknya. Strategi ini diwujudkan melalui tawaran pinjaman infrastruktur yang dinilai tidak berkelanjutan, yang pada akhirnya membebani negara peminjam dengan utang yang meningkat, sehingga memaksa mereka menyerahkan aset-aset strategis kepada Tiongkok sebagai bentuk kompensasi. Praktik tersebut telah memperparah beban utang masyarakat Venezuela, bahkan ketika sistem demokrasi di negara tersebut mengalami kemunduran (The Hudson Institute 2018).

Tiongkok dalam skema pinjaman utang luar negeri memberikan jaminan yang kuat dalam persyaratan komersial. Strategi ini membentuk sistem yang sering kali ketika

negara peminjam tidak bisa membayar utang, maka Tiongkok akan mengambil alih kepemilikan aset negara tersebut (Jackson 2024). Skema investasi dan pinjaman kredit Tiongkok menimbulkan kekhawatiran Barat bahwa sistem ini dapat menyeret negara-negara debitur yang mayoritas merupakan negara berkembang ke dalam orbit Tiongkok. Kalangan akademisi menyebut perangkat utang Tiongkok menjadi alat untuk memaksa negara-negara berkembang masuk ke dalam spektrum geopolitik (Kaplan dan Penfold 2019).

Meskipun Tiongkok merepresentasikan kehadirannya di kawasan Global Selatan sebagai upaya yang berorientasi pada pembangunan, realitas di Venezuela malah menunjukkan sebaliknya. Keterlibatan Tiongkok justru berimplikasi pada pelemahan institusi domestik serta penghambatan diversifikasi ekonomi dan proses industrialisasi, yang mengarah pada stagnasi struktural. Seiring berjalannya waktu, hubungan kedua negara tersebut berkembang menuju pola ketergantungan tradisional, Venezuela menerima investasi terbatas pada sektor berproduktivitas rendah dan menjadi pasar bagi produk konsumsi, di sisi lain tetap bergantung pada ekspor komoditas, terutama minyak (Bull dan Rosales 2025).

Kemampuan diplomasi ekonomi Tiongkok membuat Venezuela tanpa sadar terjatuh dalam skema utang yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian di tengah krisis. Melalui strategi yang halus, Tiongkok berhasil memperluas pengaruh ekonominya tanpa intervensi langsung terhadap kebijakan domestik, sekaligus tetap menghormati kedaulatan negara tersebut. Pendekatan ini mencerminkan kepentingan ekonomi politik yang tergolong sebagai ancaman berskala **rendah**.

Kehadiran Tiongkok sebagai kreditur terbesar bagi Venezuela dan dominasi proyek strategis Tiongkok di negara tersebut menciptakan spekulasi pakar yang memunculkan teori bahwa, secara paradoks, meskipun Venezuela berupaya membangun tatanan dunia multipolar melalui peningkatan kemitraan dengan Tiongkok, kedekatan dan perkembangan hubungan ekonominya dengan Tiongkok sebagai penyeimbang terhadap pengaruh Washington justru membuat negara tersebut semakin bergantung pada investasi, teknologi, dan bantuan ekonomi dari Tiongkok (Briceño-Ruiz and Medina 2020).

Investasi asing seringkali dianggap hanya mengambil keuntungan tanpa memberikan manfaat jangka panjang, yang justru membuat wilayah pinggiran semakin miskin (Baran n.d.). Sementara itu, bantuan dan pinjaman luar negeri sering kali memperkuat kelompok elit tertentu yang berpihak pada kepentingan asing, sehingga melemahkan institusi lokal (Bull dan Rosales 2025). Fenomena ini pada akhirnya bisa menggantikan ketergantungan lama Venezuela terhadap Amerika Serikat dengan ketergantungan baru terhadap Tiongkok (Briceño-Ruiz and Medina 2020).

### **3.2 Konflik dengan Pihak Ketiga**

Gelombang pengungsi Venezuela memicu sentimen negatif di berbagai negara tujuan, termasuk Peru dan Ekuador, di mana media turut memperkuat stereotip kriminal dan xenofobia terhadap warga Venezuela (Willer dkk. 2021; González 2021). Pada saat yang sama, krisis politik dalam negeri semakin memanas ketika muncul dualisme kepemimpinan pada 2019, yang mendorong The Lima Group beserta sejumlah negara Amerika Latin untuk menolak legitimasi Nicolás

Maduro dan mengakui oposisi Juan Guaidó sebagai presiden yang sah (Notibomba 2019; Reuters 2019). Tiongkok, berbeda dengan negara tetangga Venezuela, justru memilih untuk mempertahankan dukungannya terhadap Maduro (Jackson 2024). Kemudian, konflik yang paling menonjol adalah konflik dengan 2 negara Venezuela, yaitu Kolombia dan Guyana. (cakupan penelitian udh dipersempit).

### *3.2.1 Kolombia*

Venezuela dan Kolombia memiliki sejarah panjang konflik dan ketegangan sejak kedua negara ini terpecah setelah bersatu selama 10 tahun pasca merdeka dari Spanyol pada tahun 1820 di bawah kepemimpinan Simon Bolivar (Birken 1974). Sejak bubarnya Gran Colombia pada 1831, Venezuela dan Kolombia gagal mencapai kesepakatan mengenai batas perairan di Teluk, terutama terkait Kepulauan Los Monjes (Michelotti 2015). Kolombia menilai pulau-pulau kecil berjarak 20 mil laut dari pantainya tidak dapat dianggap sebagai bagian dari landas kontinen, sehingga Los Monjes diposisikan sebagai enklave dalam laut teritorialnya. Sebaliknya, Venezuela berpendapat bahwa pulau-pulau tersebut merupakan perpanjangan wilayahnya dan menerapkan prinsip garis tengah antara Semenanjung La Guajira (Kolombia) dan Los Monjes (Peláez 1990).

Sengketa perbatasan lama antara Kolombia dan Venezuela atas Teluk Venezuela (Teluk Coquivacoa) kembali mencuat setelah Presiden Nicolás Maduro melalui Dekrit 1.787 menetapkan kawasan tersebut sebagai “zona pertahanan maritim dan kepulauan”. Langkah ini diambil pada 26 Mei 2015, menyusul kontrak pemerintah Guyana dengan ExxonMobil untuk eksplorasi minyak di wilayah yang juga diklaim Caracas. Akibatnya, Menteri Luar Negeri Kolombia, María Ángela

Holguín, melayangkan nota protes terkait klaim Venezuela atas wilayah yang telah diperselisihkan lebih dari 200 tahun lalu (COHA 2015). Reaksi yang diberikan Kolombia memicu peningkatan ketegangan geopolitik kedua negara. Venezuela dan Kolombia saling menegaskan klaim atas wilayah Los Monjes yang menegaskan adanya retorika bermusuhan, namun belum mengarah kepada konflik perebutan wilayah berbasis militer. Sehingga, konflik ini berskala **sedang**.

Selain itu, berbagai tantangan muncul di wilayah perbatasan, termasuk kelompok kriminal bersenjata non-negara, praktik penyelundupan, hingga arus pengungsi dan migran yang dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi dan politik yang terjadi belakangan ini di Venezuela (Haughton dan Lewis 2024). Untuk memerangi kelompok bersenjata dan kriminal terorganisir di perbatasan, Kolombia dan Venezuela membentuk Neighbourhood Watch pada tahun 1989 dan Komisi Perbatasan Binasional pada tahun 1994 (Avila dkk. 2023). Namun, sejak Hugo Chávez memimpin, situasi kembali memanas antara tahun 2008 hingga tahun 2013 (García Pinzón dan Mantilla 2021), dipicu oleh perubahan sikap politik Venezuela dengan menganggap kekerasan gerilya sebagai masalah internal Kolombia. Kebijakan ini melemahkan kerja sama perbatasan, sebab Kolombia menuduh Venezuela mendukung kelompok Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dan Ejército de Liberación Nacional (ELN) secara diam-diam (Haughton dan Lewis 2024).

Venezuela dan Kolombia memiliki sejarah panjang konflik dan ketegangan sejak kedua negara ini terpecah setelah bersatu selama 10 tahun pasca merdeka dari Spanyol pada tahun 1820 di bawah kepemimpinan Simon Bolivar (Birken 1974). Sejak bubarnya Gran Colombia pada 1831, Venezuela dan Kolombia gagal

mencapai kesepakatan mengenai batas perairan di Teluk, terutama terkait Kepulauan Los Monjes (Michelotti 2015). Kolombia menilai pulau-pulau kecil berjarak 20 mil laut dari pantainya tidak dapat dianggap sebagai bagian dari landas kontinen, sehingga Los Monjes diposisikan sebagai enklave dalam laut teritorialnya. Sebaliknya, Venezuela berpendapat bahwa pulau-pulau tersebut merupakan perpanjangan wilayahnya dan menerapkan prinsip garis tengah antara Semenanjung La Guajira (Kolombia) dan Los Monjes (Peláez 1990).

Sengketa perbatasan lama antara Kolombia dan Venezuela atas Teluk Venezuela (Teluk Coquivacoa) kembali mencuat setelah Presiden Nicolás Maduro melalui Dekrit 1.787 menetapkan kawasan tersebut sebagai “zona pertahanan maritim dan kepulauan”. Langkah ini diambil pada 26 Mei 2015, menyusul kontrak pemerintah Guyana dengan ExxonMobil untuk eksplorasi minyak di wilayah yang juga diklaim Caracas. Akibatnya, Menteri Luar Negeri Kolombia, María Ángela Holguín, melayangkan nota protes terkait klaim Venezuela atas wilayah yang telah diperselisihkan lebih dari 200 tahun lalu (COHA 2015). Reaksi yang diberikan Kolombia memicu peningkatan ketegangan geopolitik kedua negara. Venezuela dan Kolombia saling menegaskan klaim atas wilayah Los Monjes yang menegaskan adanya retorika bermusuhan, namun belum mengarah kepada konflik perebutan wilayah berbasis militer. Sehingga, konflik ini berskala **sedang**.

Selain itu, berbagai tantangan muncul di wilayah perbatasan, termasuk kelompok kriminal bersenjata non-negara, praktik penyelundupan, hingga arus pengungsi dan migran yang dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi dan politik yang terjadi belakangan ini di Venezuela (Haughton dan Lewis 2024). Untuk memerangi kelompok bersenjata dan kriminal terorganisir di perbatasan, Kolombia dan

Venezuela membentuk Neighbourhood Watch pada tahun 1989 dan Komisi Perbatasan Binasional pada tahun 1994 (Avila dkk. 2023). Namun, sejak Hugo Chávez memimpin, situasi kembali memanas antara tahun 2008 hingga tahun 2013 (García Pinzón dan Mantilla 2021), dipicu oleh perubahan sikap politik Venezuela dengan menganggap kekerasan gerilya sebagai masalah internal Kolombia. Kebijakan ini melemahkan kerja sama perbatasan, sebab Kolombia menuduh Venezuela mendukung kelompok Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dan Ejército de Liberación Nacional (ELN) secara diam-diam (Haughton dan Lewis 2024).

Dalam periode ketegangan tersebut, Tiongkok turut memperkuat posisi Venezuela melalui penjualan senjata, dengan total nilai mencapai 629 juta dolar AS sejak tahun 2006 hingga 2023 (Diana Roy 2025). Eskalasi militer di perbatasan akibat konflik antara FARC dan ELN, disertai tuduhan bahwa Venezuela mendukung kedua kelompok tersebut menunjukkan bahwa tingkat konflik masih berkala **sedang**, karena belum berkembang menjadi perang terbuka atau pendudukan wilayah inti oleh Kolombia.

Ketidakstabilan politik Venezuela disertai dengan krisis ekonomi dan sosial memicu arus migrasi besar besaran ke Kolombia, mendorong peningkatan sekuritisasi perbatasan melalui kehadiran militer, kontrol ketat, dan kebijakan imigrasi yang lebih restriktif. Kebijakan ini dibuat oleh otoritas Kolombia untuk mengatasi tekanan demografis yang membebani sumber daya dan infrastruktur, sekaligus mencerminkan kekhawatiran atas potensi ancaman keamanan lintas batas. Situasi diperparah oleh ketegangan diplomatik yang memperburuk hubungan kedua negara (Haughton dan Lewis 2024). Sejak tahun 2015, lebih dari 7,1 juta

warga Venezuela meninggalkan negaranya akibat krisis, dengan sekitar 2,9 juta orang mengungsi ke Kolombia pada tahun 2022 (Frontera y Sociedad 2022).

Venezuela dan Kolombia memiliki sejarah panjang konflik dan ketegangan sejak kedua negara ini terpecah setelah bersatu selama 10 tahun pasca merdeka dari Spanyol pada tahun 1820 di bawah kepemimpinan Simon Bolivar (Birken 1974). Sejak bubarnya Gran Colombia pada 1831, Venezuela dan Kolombia gagal mencapai kesepakatan mengenai batas perairan di Teluk, terutama terkait Kepulauan Los Monjes (Michelotti 2015). Kolombia menilai pulau-pulau kecil berjarak 20 mil laut dari pantainya tidak dapat dianggap sebagai bagian dari landas kontinen, sehingga Los Monjes diposisikan sebagai enklave dalam laut teritorialnya. Sebaliknya, Venezuela berpendapat bahwa pulau-pulau tersebut merupakan perpanjangan wilayahnya dan menerapkan prinsip garis tengah antara Semenanjung La Guajira (Kolombia) dan Los Monjes (Peláez 1990).

Sengketa perbatasan lama antara Kolombia dan Venezuela atas Teluk Venezuela (Teluk Coquivacoa) kembali mencuat setelah Presiden Nicolás Maduro melalui Dekrit 1.787 menetapkan kawasan tersebut sebagai “zona pertahanan maritim dan kepulauan”. Langkah ini diambil pada 26 Mei 2015, menyusul kontrak pemerintah Guyana dengan ExxonMobil untuk eksplorasi minyak di wilayah yang juga diklaim Caracas. Akibatnya, Menteri Luar Negeri Kolombia, María Ángela Holguín, melayangkan nota protes terkait klaim Venezuela atas wilayah yang telah diperselisihkan lebih dari 200 tahun lalu (COHA 2015). Reaksi yang diberikan Kolombia memicu peningkatan ketegangan geopolitik kedua negara. Venezuela dan Kolombia saling menegaskan klaim atas wilayah Los Monjes yang menegaskan

adanya retorika bermusuhan, namun belum mengarah kepada konflik perebutan wilayah berbasis militer. Sehingga, konflik ini berskala **sedang**.

Selain itu, berbagai tantangan muncul di wilayah perbatasan, termasuk kelompok kriminal bersenjata non-negara, praktik penyelundupan, hingga arus pengungsi dan migran yang dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi dan politik yang terjadi belakangan ini di Venezuela (Haughton dan Lewis 2024). Untuk memerangi kelompok bersenjata dan kriminal terorganisir di perbatasan, Kolombia dan Venezuela membentuk Neighbourhood Watch pada tahun 1989 dan Komisi Perbatasan Binasional pada tahun 1994 (Avila dkk. 2023). Namun, sejak Hugo Chávez memimpin, situasi kembali memanas antara tahun 2008 hingga tahun 2013 (García Pinzón dan Mantilla 2021), dipicu oleh perubahan sikap politik Venezuela dengan menganggap kekerasan gerilya sebagai masalah internal Kolombia. Kebijakan ini melemahkan kerja sama perbatasan, sebab Kolombia menuduh Venezuela mendukung kelompok Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dan Ejército de Liberación Nacional (ELN) secara diam-diam (Haughton dan Lewis 2024).

Dalam konteks ini, Amerika Serikat turut memperkuat posisi Kolombia melalui dukungan keamanan. Kolombia dan Amerika Serikat menjalin kemitraan keamanan jangka panjang yang berfokus pada isu antinarkotika, antiterorisme, serta tekanan regional terhadap Venezuela (Beittle dan June 2023). Selain itu, sejak tahun 2000 Kolombia menjadi salah satu penerima utama bantuan AS untuk memperkuat aparat keamanannya, membantu merebut kembali wilayah dari kelompok bersenjata ilegal yang ditengarai mendapatkan dukungan Venezuela (Seelke dan Ribando 2025).

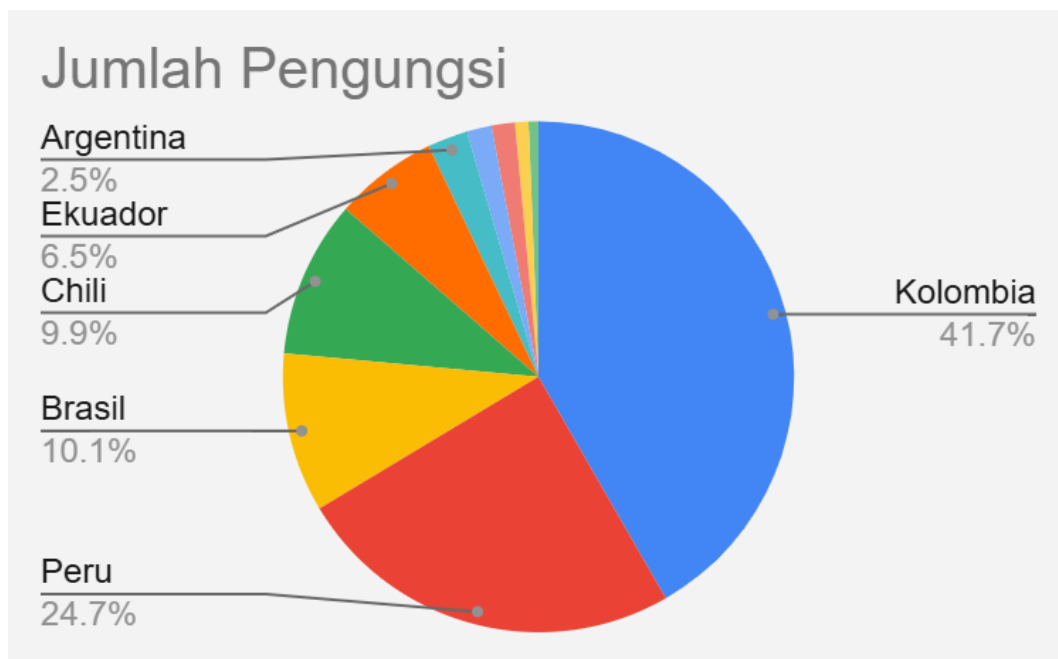
Dalam periode ketegangan tersebut, Tiongkok turut memperkuat posisi Venezuela melalui penjualan senjata, dengan total nilai mencapai 629 juta dolar AS sejak tahun 2006 hingga 2023 (Diana Roy 2025). Eskalasi militer di perbatasan akibat konflik antara FARC dan ELN, disertai tuduhan bahwa Venezuela mendukung kedua kelompok tersebut menunjukkan bahwa tingkat konflik masih berkala **sedang**, karena belum berkembang menjadi perang terbuka atau pendudukan wilayah inti oleh Kolombia.

Ketidakstabilan politik Venezuela disertai dengan krisis ekonomi dan sosial memicu arus migrasi besar besaran ke Kolombia, mendorong peningkatan sekuritisasi perbatasan melalui kehadiran militer, kontrol ketat, dan kebijakan imigrasi yang lebih restriktif. Kebijakan ini dibuat oleh otoritas Kolombia untuk mengatasi tekanan demografis yang membebani sumber daya dan infrastruktur, sekaligus mencerminkan kekhawatiran atas potensi ancaman keamanan lintas batas. Situasi diperparah oleh ketegangan diplomatik yang memperburuk hubungan kedua negara (Haughton dan Lewis 2024). Sejak tahun 2015, lebih dari 7,1 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya akibat krisis, dengan sekitar 2,9 juta orang mengungsi ke Kolombia pada tahun 2022 (Frontera y Sociedad 2022).

Dalam periode ketegangan tersebut, Tiongkok turut memperkuat posisi Venezuela melalui penjualan senjata, dengan total nilai mencapai 629 juta dolar AS sejak tahun 2006 hingga 2023 (Diana Roy 2025). Eskalasi militer di perbatasan akibat konflik antara FARC dan ELN, disertai tuduhan bahwa Venezuela mendukung kedua kelompok tersebut menunjukkan bahwa tingkat konflik masih berkala **sedang**, karena belum berkembang menjadi perang terbuka atau pendudukan wilayah inti oleh Kolombia.

Ketidakstabilan politik Venezuela disertai dengan krisis ekonomi dan sosial memicu arus migrasi besar besaran ke Kolombia, mendorong peningkatan sekuritisasi perbatasan melalui kehadiran militer, kontrol ketat, dan kebijakan imigrasi yang lebih restriktif. Kebijakan ini dibuat oleh otoritas Kolombia untuk mengatasi tekanan demografis yang membebani sumber daya dan infrastruktur, sekaligus mencerminkan kekhawatiran atas potensi ancaman keamanan lintas batas. Situasi diperparah oleh ketegangan diplomatik yang memperburuk hubungan kedua negara (Haughton dan Lewis 2024). Sejak tahun 2015, lebih dari 7,1 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya akibat krisis, dengan sekitar 2,9 juta orang mengungsi ke Kolombia pada tahun 2022 (Frontera y Sociedad 2022).

**Diagram 2. Pengungsi Venezuela di Amerika Latin dan Karibia**



Sumber: R4V (2025)

### 3.2.2 Guyana

Perebutan wilayah menjadi isu yang kontroversial selama berabad-abad antara Venezuela dan Guyana. Setelah Amerika Serikat melonggarkan sanksi pada tahun 2023, permasalahan dengan Guyana terkait kendali wilayah Essequibo yang kembali memanas menjadi alasan Washington mengetatkan lagi sanksi terhadap minyak Venezuela pada tahun 2024 (Diana Roy dkk. 2024). Essequibo adalah kawasan seluas 160.000 kilometer persegi (62.000 mil persegi), yang didominasi oleh hutan, sungai, serta pegunungan, dan juga menyimpan sumber daya alam penting seperti minyak dan emas, berpenduduk sekitar 125.000 jiwa dari total 800.000 jiwa penduduk Guyana (Raghubir 2024). Sengketa perbatasan yang berkepanjangan antara Guyana dan Venezuela berawal dari klaim Venezuela bahwa Putusan Arbitrase tahun 1899 terkait batas wilayah antara Guyana Britania dan Venezuela tidak memiliki keabsahan hukum serta dianggap batal (UN DPPA 2017).

**Gambar 3. Peta Wilayah Essequibo**



Sumber: Mongabay (2024)

Sejak awal 1960-an, Venezuela menempuh beragam strategi untuk menolak Putusan Arbitrase, mulai dari tekanan diplomatik hingga upaya pembatalan melalui jalur non-yudisial. Venezuela menunjukkan konsistensi penolakannya terhadap putusan arbitrase dengan mengeluarkan Dekrit No. 4415 pada tahun 2020. Dekrit ini mengklaim kedaulatan atas wilayah maritim yang masih disengketakan (Minfor n.d.). Pemilu legislatif dan regional yang dilaksanakan pada bulan Mei 2024 menjadi ajang bagi pemerintah Venezuela untuk menegaskan kendali atas Essequibo. Venezuela untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan perwakilan, tidak hanya bagi 23 negara bagian yang telah diakui, tetapi juga mencakup satu entitas baru, yakni Negara Bagian Guayana Esequiba (Ellis 2025).

Pemerintah Venezuela mengumumkan agenda ini pada 7 Januari 2024, yang kemudian menjadi awal putaran ketegangan terbaru antara kedua negara (Phil Gunson 2025). Venezuela memicu ketegangan di perbatasan Essequibo melalui penerbitan dekrit dan pelibatan wilayah Guayana Esequiba dalam pemilu legislatif 2024. Tindakan tersebut mencerminkan konflik berskala **sedang** dalam kurun waktu 2020–2024 yang ditandai dengan sengketa teritorial di kawasan perbatasan.

Pada 1 Maret 2024, sebuah kapal perang milik angkatan laut Venezuela mendekati kapal-kapal produksi minyak ExxonMobil yang beroperasi di blok lepas pantai Stabroek, di timur laut Georgetown, ibukota Guyana. Tindakan ini dilakukan Venezuela untuk memperingatkan bahwa Guyana dianggap memasuki wilayah yang diklaim Venezuela sebagai zona ekonomi eksklusifnya (Newsroom 2025). Sebagai respon, pemerintah Guyana mengerahkan angkatan udara serta penjaga pantai ke wilayah tersebut, memberitahu organisasi multilateral beserta sekutunya,

dan menyampaikan protes resmi atas tindakan yang dinilainya sebagai ancaman terhadap keutuhan teritorialnya (Duncan dan Marks 2025).

Konflik ini berkaitan dengan klaim teritorial yang tegas. Venezuela dan Guyana saling menegaskan hak atas wilayah yang sama. Eskalasi militer meningkatkan ketegangan regional dan menarik keterlibatan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Inggris. Pada Januari 2024, Inggris mengirim kapal patroli lepas pantai, HMS Trent, ke Georgetown sebagai bentuk penegasan komitmennya terhadap keamanan Guyana (Royal Navy News 2024). Washington telah menugaskan pejabat sipil dan militer senior, menempatkan aset militernya di kawasan tersebut, serta melaksanakan latihan gabungan dengan Angkatan Pertahanan Guyana (Wilkinson 2024). Anggota G7 turut memberikan kecaman terhadap Venezuela, menilai langkah Venezuela sebagai “tindakan yang tidak bisa diterima dan melanggar hak kedaulatan Guyana yang telah diakui oleh komunitas internasional” (CMC 2025). Ini menjadikan konflik perbatasan meningkat ke skala **tinggi**.

Pada awal 2018, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memutuskan agar sengketa wilayah tersebut diajukan ke International Court of Justice (ICJ). Menindaklanjuti hal itu, Guyana pada Maret 2018 mengajukan permohonan resmi ke ICJ. Pada Desember 2020, ICJ menyatakan bahwa pihaknya memiliki kewenangan untuk menangani kasus tersebut. Venezuela menolak keputusan itu dengan menggugat kewenangan pengadilan, namun pada April 2023 ICJ kembali menegaskan yurisdiksinya (Mandy Loader n.d.). Pimpinan Organisasi Negara-negara Amerika, Persemakmuran, dan Komunitas Karibia (Caricom), bersama sejumlah negara seperti Perancis, Kanada, dan Inggris yang merupakan sekutu

Guyana turut mengajukan protes (Phil Gunson 2025). Penyelesaian sengketa melalui ICJ, serta adanya tekanan dari sekutu Guyana menimbulkan dampak politik dan diplomatik bagi Venezuela, yang kemudian mengindikasikan konflik berskala **sedang**.

### **3.3 Bantuan Kekuatan Besar (Amerika Serikat)**

Sejak harga minyak turun drastis, Venezuela mengalami gejolak politik dan kontraksi ekonomi yang hebat. Baru-baru ini, angka inflasi Venezuela mengalami kenaikan menjadi 172% pada April 2025, lebih tinggi dibandingkan 136% pada Maret 2025. Bahkan, pernah terjadi inflasi terparah mencapai 344.509,50% pada Februari 2019 (Trading Economics n.d.). Ekonomi Venezuela mengalami keruntuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah kontraksi sebesar 70% pada periode 2013-2019, aktivitas ekonomi kembali turun sekitar 30% pada tahun 2020, menjadikannya salah satu kejatuhan ekonomi terbesar di dunia. Daya beli rumah tangga merosot tajam, menyebabkan peningkatan kemiskinan dan ketimpangan, disertai memburuknya indikator sosial dan runtuhnya layanan dasar (Abuelafia dan Sabion 2020).

Di tengah situasi nasional yang tidak stabil, Venezuela menghadapi tekanan multidimensional. Di samping meningkatnya ketegangan dengan negara-negara tetangga di kawasan Amerika Latin, Amerika Serikat juga memberlakukan tekanan serupa. Hubungan antara Venezuela dan Amerika Serikat yang sebelumnya menjadi mitra strategis dalam perdagangan minyak mengalami kemerosotan sejak era pemerintahan Hugo Chávez. Ketegangan semakin memuncak di bawah kepemimpinan Nicolás Maduro akibat tindakan represif terhadap oposisi dan

masyarakat sipil, maraknya korupsi serta perdagangan narkoba, kecurangan dalam proses elektoral, dan penghambatan distribusi bantuan kemanusiaan (Brown dkk. 2022).

Ketika Venezuela mengalami krisis akibat hiperinflasi pada tahun 2017, tingkat kerawanan pangan mencapai puncaknya (Jennifer 2023). Amerika Serikat turut menyalurkan bantuan serta berperan dalam mengkoordinasikan upaya regional untuk menangani krisis migrasi yang berasal dari Venezuela. Pada Tahun Anggaran 2017 hingga 2020, Amerika Serikat mengalokasikan dana sebesar 1 miliar dolar AS untuk mendukung Venezuela serta negara-negara penerima pengungsi asal Venezuela. Sejak Tahun Anggaran 2018, USAID telah mengalokasikan dana sebesar 125 juta dolar AS untuk mendukung program demokrasi, pembangunan, serta sektor kesehatan di Venezuela (Congressional Research Service 2021). Namun, alih-alih merespons krisis dengan bantuan kemanusiaan yang netral, Amerika Serikat disebut mengerahkan bantuan yang mengindikasikan agenda politisasi (Roy 2022).

Pada tahun 2019, Washington melalui oposisi Juan Guaido menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Venezuela, namun bantuan tersebut ditolak oleh Maduro. Nicolás Maduro menolak masuknya bantuan kemanusiaan yang dianggapnya sebagai upaya “palsu”, dengan menyatakan bahwa Venezuela tidak mengalami krisis kemanusiaan sebagaimana yang disebut oleh Washington. Ia menilai narasi tersebut merupakan rekayasa politik yang telah dibangun selama empat tahun terakhir untuk membenarkan intervensi terhadap kedaulatan Venezuela (DW 2019). Pada periode 2017–2019, bantuan Amerika Serikat berskala

**sedang**, karena tetap berupaya menyalurkan bantuan dalam kondisi krisis kepada Venezuela walau dibarengi dengan agenda politik.

Sebagai dampaknya, pada 15 November 2024, pemerintah Venezuela mengesahkan undang-undang regresif yang meningkatkan kontrol negara terhadap LSM yang didanai asing serta mensyaratkan izin resmi bagi LSM untuk menjalankan kegiatannya (Dib dan Bare 2025). Kemudian, pada Januari 2025, Pemerintahan Trump menginstruksikan penghentian sementara penyaluran dana USAID (Coalicion por Venezuela 2025). Diberlakukannya undang-undang pengawasan LSM, diikuti pencabutan bantuan AS yang dialokasikan melalui LSM menjadi pukulan telak bagi masyarakat Venezuela di tengah krisis. Pembekuan bantuan luar negeri oleh Amerika Serikat justru memperkuat tindakan represif otoritas Venezuela terhadap masyarakat sipil dan media independen (Dib dan Bare 2025). Penghentian pendanaan USAID melemahkan peran LSM dalam merespons krisis, sehingga pada tahun 2025 bantuan Amerika Serikat untuk penanganan krisis di Venezuela **tidak ada**.

Sementara itu, pada tahun 2019, Amerika Serikat juga bersama lebih dari 50 negara yang bergabung dalam the Lima Group di Amerika Latin dan Kanada, serta sebagian besar anggota Uni Eropa menyatakan dukungan terhadap Juan Guaidó sebagai presiden sementara Venezuela dan menyerukan pelaksanaan transisi demokrasi melalui pemilihan umum yang segera (Brookings 2019). Amerika Serikat bahkan memusuhi dan memberikan ancaman terhadap rezim Maduro, dengan tujuan untuk mendesak pemulihan sistem demokrasi serta akuntabilitas pejabat dan pendukung Maduro atas tindakan yang dilakukan (Seelke dkk. 2021). Ini menegaskan bahwa bantuan **tidak ada**.

Faktor yang semakin memperumit upaya Amerika Serikat dalam mempengaruhi masa depan politik Venezuela adalah meningkatnya keterlibatan Tiongkok di negara tersebut serta semakin eratnya hubungan antara pemerintahan Maduro dengan Beijing (Hare 2025). Berbeda dengan para pemimpin negara-negara Barat, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyampaikan ucapan selamat kepada Nicolás Maduro setelah ia mengumumkan kemenangannya pada pemilihan tahun 2024 (IDCPC 2024). Bagi sebagian elit politik Amerika Serikat yang agresif, pengaruh Tiongkok terhadap Maduro merupakan pencederaan terhadap visi tradisional AS sebagai kekuatan hegemon di kawasan (Hare 2025).

Simbol kedekatan Tiongkok dan Venezuela juga ditunjukkan dalam upaya pemerintah Venezuela untuk bergabung ke dalam keanggotaan di BRICS, serta semakin memperkuat tekad untuk mendukung kepentingan Tiongkok di organisasi-organisasi internasional seperti PBB (Roy 2025). Pada Mei 2023, kerja sama Venezuela-Tiongkok telah diperkuat dari “kemitraan strategis” menjadi “kemitraan strategis komprehensif” (Dominguez 2024). Kemitraan ini dipertegas kembali dalam penerbitan Bilateral Investment Treaty (BIT) oleh pemerintah Venezuela yang ditandatangani dengan Tiongkok pada Mei 2024 (hsfkramer.com. 2024). Ini tidak hanya mencerminkan hubungan diplomatik, akan tetapi juga komitmen dalam kolaborasi ekonomi (Global Law Firm 2024).

Amerika Serikat di sisi lain memberlakukan sanksi terhadap Venezuela. Presiden Donald Trump, pada tahun 2017, menutup akses rezim Maduro terhadap sistem keuangan Amerika Serikat, melarang perusahaan serta warga negara AS membeli utang Venezuela, dan menghentikan ekspor minyak PDVSA ke Amerika Serikat (Roy 2022). Peran vital minyak dalam perekonomian Venezuela, ditambah

dengan ketergantungan ekspor ke Amerika Serikat sebagai pasar utama, menjadikan sektor tersebut sasaran utama sanksi ekonomi AS (Seelke dkk. 2021). Meskipun begitu, saat perekonomian Venezuela runtuh pada tahun 2013 hingga 2017, Tiongkok menambah investasi kredit mencapai 20 miliar dolar di Venezuela. Ini menggambarkan semakin luasnya ekspansi kemitraan ekonomi Tiongkok di Amerika Latin (Ferchen 2020).

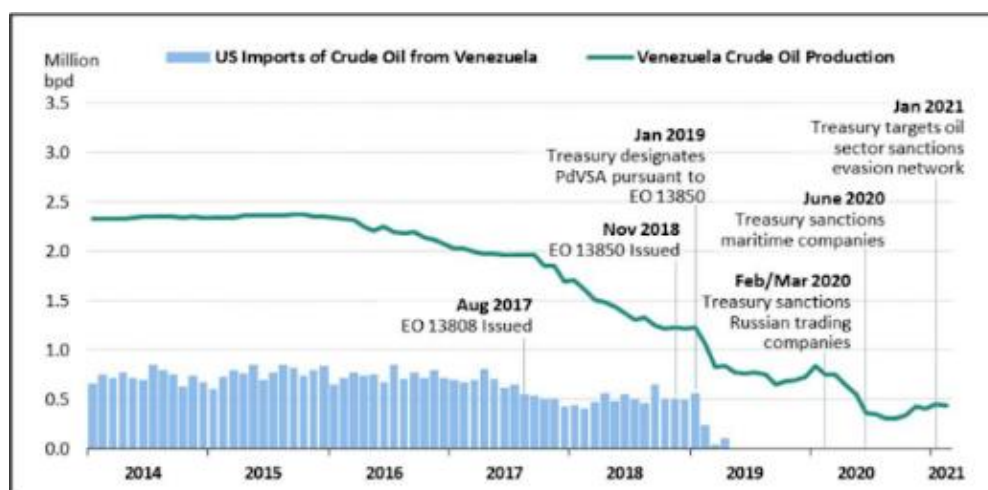
Pada November 2018, Presiden Trump menerbitkan EO 13850 yang memberi wewenang kepada Departemen Keuangan AS untuk membekukan aset dan melarang transaksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sektor ekonomi tertentu di Venezuela atau praktik korupsi terkait pemerintahan Maduro (Seelke dan Ribando 2025). Sanksi minyak mulai diterapkan pada awal 2019, disusul dengan larangan seluruh transaksi dengan pemerintah Venezuela pada akhir tahun itu, serta pembatasan terhadap perusahaan asing yang terlibat dalam pemasaran minyak Venezuela di luar pasar AS pada awal 2020. Menjelang akhir 2020, kebijakan Amerika Serikat terhadap Venezuela sepenuhnya diarahkan untuk memperketat kontrol atas transaksi ekonomi dan keuangan rezim tersebut (Rodríguez n.d.). Minyak, yang pada Januari 2019 menyumbang sekitar 93% dari total ekspor dan 12% dari PDB, menjadi sektor paling vital yang terkena dampak sanksi. Oleh karena itu, Amerika Serikat menetapkan PDVSA sebagai sasaran utama dalam rangka meningkatkan tekanan signifikan terhadap rezim Venezuela (Young dkk. 2019).

Pada Januari 2019, berdasarkan EO 13850, OFAC menetapkan PdVSA sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor minyak Venezuela dan menjatuhkan sanksi dengan membekukan seluruh aset PdVSA di bawah yurisdiksi AS serta

melarang warga maupun entitas AS bertransaksi dengan perusahaan tersebut. OFAC juga memberlakukan sanksi terhadap Bank Sentral Venezuela, Bank Pembangunan Nasional, dan perusahaan emas milik negara, Minerven (Seelke dan Ribando 2025).

Dampak utama sanksi terhadap pasar minyak global mencakup penurunan produksi minyak Venezuela serta penghentian impor minyak mentah negara tersebut oleh Amerika Serikat (Seelke dkk. 2021). Sanksi terhadap perekonomian dan sektor minyak sebagai sumber utama pendapatan Venezuela menegaskan bahwa Amerika Serikat benar-benar memusuhi negara tersebut, yang mengisyaratkan **tidak adanya** bantuan pada periode ini.

**Grafik 2. Produksi Minyak Mentah Venezuela, Impor AS, dan Peristiwa Sanksi Tertentu**



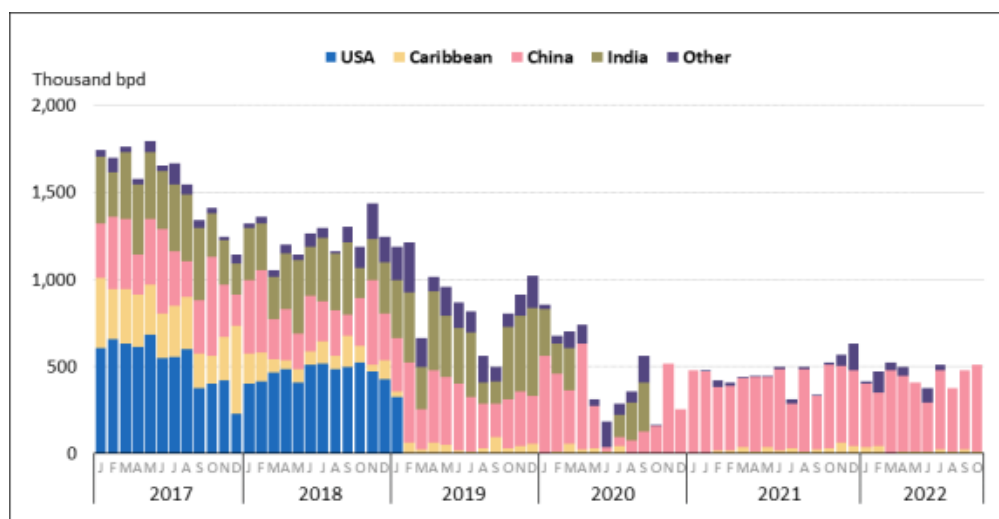
Sumber: Congressional Research Service (2021)

Perubahan impor minyak mentah Venezuela oleh kilang-kilang di Amerika Serikat dapat diamati secara kuantitatif. Sebelum penerapan sanksi terhadap sektor perminyakan, kilang AS mengimpor sekitar 500.000 hingga 700.000 barel per hari

dari Venezuela. Namun, impor tersebut sepenuhnya terhenti pada April 2019 (Seelke dkk. 2021).

Sejak berakhirnya ekspor minyak ke Amerika Serikat pada Januari 2019, India dan Tiongkok muncul sebagai dua mitra utama dalam perdagangan minyak mentah Venezuela, dengan Tiongkok menjadi tujuan ekspor utama pada periode Oktober 2020 hingga Oktober 2022 (Seelke dkk. 2022).

**Diagram 3. Ekspor Minyak Mentah Venezuela (Januari 2017-Oktober 2022)**



Sumber: Congress Report (2022)

Sanksi pada tahun 2019 mengakibatkan hilangnya devisa miliaran dolar. Pengakuan pemerintahan paralel saat itu mempercepat keterputusan Venezuela dari sistem pembayaran internasional dan membatasi akses terhadap impor vital seperti obat-obatan dan pangan (Weisbrot dan Sachs 2019). Fenomena ini menimbulkan persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial yang substansial, tercermin dari kondisi 10% kelompok masyarakat berpendapatan tinggi memperoleh rata-rata 553,20 dolar per bulan, sementara 10% kelompok berpendapatan rendah hanya memperoleh rata-rata 8 dolar per bulan (Vivian Sequera 2022).

Dengan demikian, alih-alih membantu Venezuela keluar dari krisis, kebijakan Amerika Serikat melalui penerapan sanksi, terutama sanksi ekonomi yang didorong oleh ambisi untuk menggulingkan pemerintahan Maduro justru secara tidak langsung memperburuk kondisi Venezuela dan mencerminkan **tidak adanya** bantuan Amerika Serikat dalam penyelesaian krisis ini.

**Tabel 2. Analisis *Bandwagoning***

| Variabel Analisis                                            | No. | Dinamika                                                                                                        | Skala  | Indikator                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tingkat Keparahan Ancaman dan Bandwagoning terhadap Tiongkok | 1.  | Tiongkok memberikan kredit kepada Venezuela dengan skema pembayaran melalui impor minyak jauh sebelum sanksi AS | Rendah | Menciptakan ketergantungan awal, tetapi belum menggoyahkan sektor ekonomi fundamental                          |
|                                                              | 2.  | Kegagalan Venezuela dalam membayar porsi saham dalam proyek kilang minyak di Guangdong, Tiongkok                | Rendah | Kapasitas finansial lemah, tetapi belum melumpuhkan perekonomian nasional                                      |
|                                                              | 3.  | Sinopec menggugat PdVSA karena kegagalan dalam membayar obligasi                                                | Tinggi | PdVSA menopang perekonomian nasional. Gugatan terhadap PdVSA berpotensi memberikan tekanan terhadap perusahaan |
|                                                              | 4.  | Saat ketegangan antara AS dan Venezuela meningkat, Tiongkok tetap memberikan dukungan                           | Rendah | Terjalinnnya hubungan yang baik dengan Tiongkok                                                                |
|                                                              | 5.  | Venezuela tidak mampu                                                                                           | Tinggi | Penghentian                                                                                                    |

|                                        |    |                                                                                                                                    |        |                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |    | memenuhi pasokan minyak berdasarkan perjanjian utang dan CNPC menghentikan impor minyak dari Venezuela akibat pengetatan sanksi AS |        | impor berpotensi menggoyahkan sektor ekonomi fundamental, memukul sumber devisa utama                                        |
|                                        | 6. | Tensi yang meningkat antara Tiongkok dan AS di Venezuela                                                                           | Rendah | Tekanan berasal dari dinamika geopolitik, bukan instrumen ekonomi langsung                                                   |
|                                        | 7. | Jebakan utang Tiongkok                                                                                                             | Tinggi | Berpotensi melumpuhkan kemampuan fiskal Venezuela dalam jangka panjang, menciptakan ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok |
| Konflik dengan Pihak Ketiga (Kolombia) | 1. | Sengketa perbatasan Kepulauan Los Monjes                                                                                           | Sedang | Adanya perebutan perbatasan yang menciptakan retorika bermusuhan antara Venezuela dan Kolombia                               |
|                                        | 2. | Kolombia menuduh Venezuela mendanai gerakan kelompok pemberontak ELN dan FARC                                                      | Sedang | Konflik belum berkembang menjadi perang terbuka atau pendudukan wilayah inti oleh Kolombia                                   |
| Konflik dengan Pihan Ketiga (Guyana)   | 1. | Venezuela menerbitkan dekret No. 4415 dan melibatkan wilayah Guayana Esequiba dalam pemilu legislatif tahun 2024                   | Sedang | Adanya retorika bermusuhan dan interaksi yang terbatas antara Venezuela dan Guyana                                           |
|                                        | 2. | Meningkatnya ketegangan                                                                                                            | Tinggi | Ketegangan                                                                                                                   |

|                                          |    |                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |    | dalam perebutan wilayah Guayana Esequiba. Pada Maret 2024, kapal perang angkatan laut Venezuela mendekati lepas pantai Stabroek dan sekutu Guyana mulai terlibat |           | bersifat intens, tidak ada diplomasi, dan mulai melibatkan militer                                                                        |
|                                          | 3. | Sengketa wilayah mulai dibawa ke persidangan ICJ dan melibatkan negara sekutu Guyana, seperti AS, Persemakmuran, Caricom, Prancis, Kanada, hingga Inggris        | Sedang    | Terdapat protes dari negara pendukung Guyana terhadap penolakan Venezuela atas gugatan di ICJ yang menunjukkan adanya retorika bermusuhan |
| Bantuan Kekuatan Besar (Amerika Serikat) | 1. | AS menyalurkan bantuan melalui oposisi Juan Guaido sangat Venezuela mengalami krisis ekonomi dan inflasi besar-besaran                                           | Sedang    | Adanya bantuan ekonomi simbolis dan terbatas                                                                                              |
|                                          | 2. | Penghentian penyaluran dana USAID                                                                                                                                | Tidak ada | Tidak ada dukungan ekonomi ataupun retorika yang mendukung                                                                                |
|                                          | 3. | AS memusuhi dan mengancam Maduro akibat krisis yang terjadi dan mendukung oposisi Juan Guaido bersama beberapa negara lainnya                                    | Tidak ada | Tidak adanya diplomasi, AS memusuhi Presiden Maduro dan mengancam menggulingkan kepemimpinan                                              |
|                                          | 4. | Sanksi terhadap perekonomian dan sektor minyak                                                                                                                   | Tidak ada | AS memberikan ancaman sanksi kepada Venezuela untuk menekan rezim agar menyelesaikan masalah krisis                                       |

|  |    |                                             |           |                                                                                                                 |
|--|----|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 5. | AS menghentikan impor minyak dari Venezuela | Tidak ada | Penghentian impor minyak oleh AS menciptakan ancaman ekonomi. Venezuela mengalihkan kemitraan utama ke Tiongkok |
|--|----|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan hasil analisis terhadap dinamika hubungan Venezuela dan Tiongkok selama periode sanksi minyak Amerika Serikat (2017–2025), dapat disimpulkan bahwa pergeseran mitra perdagangan minyak Venezuela dari Amerika Serikat ke Tiongkok merupakan bentuk strategi *bandwagoning* yang dipengaruhi oleh dinamika interaksi Venezuela terhadap negara hegemon dan aktor negara lainnya.

*Pertama*, tingkat keparahan ancaman dari Tiongkok tergolong rendah hingga tinggi. Meskipun Tiongkok memiliki kapasitas untuk memberikan tekanan kepada perekonomian Venezuela melalui skema utang, proyek energi, dan kontrol atas arus pendapatan minyak, bentuk ancaman Tiongkok tidak secara langsung melumpuhkan ekonomi nasional. Namun, posisi Tiongkok dalam perekonomian Venezuela secara bertahap mempersempit ruang manuver Venezuela dan menciptakan ketergantungan struktural.

*Kedua*, konflik dengan pihak ketiga, dalam hal ini negara-negara tetangga Venezuela di kawasan Amerika Selatan terbilang sedang hingga tinggi. Venezuela dikucilkan secara politik oleh negara tetangga akibat krisis politik dan ekonomi di bawah pemerintahan Nicolás Maduro, ditambah dengan eskalasi konflik di perbatasan yang terjadi dengan Kolombia dan Guyana. Hubungan diplomatik

dengan Kolombia dan Guyana memburuk, sementara tekanan internasional meningkat. Kondisi ini mempersempit ruang diplomasi dan membuat Venezuela semakin terisolasi.

*Ketiga*, bantuan dari kekuatan besar, dalam hal ini Amerika Serikat berada pada kategori rendah hingga tidak ada. Di saat Venezuela membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan krisis dalam negerinya, AS memberikan bantuan yang mengindikasikan adanya agenda politik, bahkan memberikan pukulan terhadap perekonomian melalui sanksi. Ketidakhadiran dukungan ini selaras dengan Teori Bandwagoning Motin bahwa negara yang tidak memperoleh dukungan dari kekuatan besar dan berkonflik dengan negara lain di kawasan akan ikut-ikutan dengan hegemon potensial. Ketiadaan dukungan AS memperkuat ketergantungan Venezuela terhadap Tiongkok dan memperdalam hubungan kedua negara.

Kombinasi ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa Venezuela tidak lagi sekadar melakukan akomodasi terhadap Tiongkok, tetapi telah memasuki tahap **keselarasan penuh (*full alignment*)**. Hal ini terlihat dari penyesuaian kebijakan, seperti prinsip non-intervensi, yang mana kedua negara secara serentak menolak intervensi AS dalam urusan domestik Venezuela. Selain itu, ekspor minyak Venezuela juga diprioritaskan untuk Tiongkok atas perjanjian utang, pemberian ruang strategis kepada perusahaan energi Tiongkok dalam struktur industri minyak nasional, serta dukungan Venezuela terhadap agenda Tiongkok dalam organisasi internasional.

## **BAB 4 PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menemukan bahwa pergeseran mitra perdagangan minyak Venezuela dari Amerika Serikat ke Tiongkok dapat dijelaskan melalui Teori Bandwagoning. Selain tekanan sanksi dari Amerika Serikat yang memperbesar persepsi ancaman Venezuela, Tiongkok juga memberikan ancaman melalui mekanisme kredit berbasis komoditas dan ketergantungan finansial yang membuat Venezuela berada pada posisi tawar yang lemah. Di tengah situasi tersebut, Venezuela memilih untuk *bandwagon* atau memperkuat ketergantungan terhadap Beijing sebagai strategi bertahan atas dasar tawaran kredit, investasi, serta dukungan politik yang stabil di saat tekanan datang dari berbagai arah.

Kombinasi ancaman dari Tiongkok, konflik dengan pihak ketiga, dan tidak adanya bantuan dari Amerika Serikat mendorong Venezuela untuk melakukan keselarasan penuh terhadap Tiongkok. Dengan demikian, kedekatan Venezuela dan Tiongkok bukan sekedar keputusan ekonomi, tetapi juga pilihan strategis dalam menghadapi perubahan struktur kekuatan dan tekanan eksternal.

### **4.2 Rekomendasi**

Penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup analisis yang berfokus pada periode sanksi Amerika Serikat terhadap Venezuela sejak tahun 2017 hingga 2025. Sehingga, kajian lebih lanjut dapat berupa analisis mendalam terkait dampak jangka panjang dari pergeseran mitra perdagangan minyak Venezuela terhadap stabilitas ekonomi nasional, serta tingkat kemandirian energi dan pembangunan.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsekuensi strategis dari perubahan arah perdagangan Venezuela dalam konteks kebijakan sanksi internasional dan dinamika ekonomi-politik global.

## DAFTAR PUSTAKA

- AA. 2017. “Venezuela Gunakan Yuan Untuk Perdagangan Minyak.” Accessed November 1, 2025. <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/venezuela-gunakan-yuan-untuk-perdagangan-minyak/913080>.
- Abuelafia, Saboin. 2020. “A look to the Future for Venezuela” Accessed November 1, 2025. <https://publications.iadb.org/en/publications/english/viewer/A-Look-to-the-Future-for-Venezuela.pdf>.
- AIER. 2017. *Venezuela: Socialism, Hyperinflation, and Economic Collapse* | AIER. March 1. <https://aier.org/research/venezuela-socialism-hyperinflation-and-economic-collapse/>.
- Aimee Gabay. 2024. “Guyana Amerindian communities fear Venezuela’s move to annex oil-rich region”. Accessed November 3, 2025. <https://news.mongabay.com/2024/01/guyana-amerindian-communities-fear-venezuelas-move-to-annex-oil-rich-region/>.
- Aizhu, Chen. 2025. “Traders Rebrand Venezuelan Oil for China as Brazilian, Sources and Tanker Trackers Say.” Energy. *Reuters*, May 12. <https://www.reuters.com/business/energy/traders-rebrand-venezuelan-oil-china-brazilian-sources-tanker-trackers-say-2025-05-12/>.
- Alamsyah, Mirah Satria, and Indra Jaya Wiranata. 2021. “China-Venezuela Relations: China Dilemmatic Options towards Venezuela Crisis and the Role of China Community of Common Destiny Principles in Maintaining Cooperation.” *JASSP* 1 (2): 93–102. <https://doi.org/10.23960/jassp.v1i2.32>.
- Anggun Novitasari, 1746071014. 2022. “ANALISIS MOTIF BANTUAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP VENEZUELA MELALUI UNITED STATES AGENCY OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID), 2017-2019.” Skripsi. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, May 18. <https://digilib.unila.ac.id/63107/>.
- Ashidiqi, Amalia Safira, and Marten Hanura. 2019. “Pengaruh Idiosinkratik Nicolas Maduro Terhadap Penolakan Bantuan Kemanusiaan Amerika Serikat Dalam Krisis Venezuela.” *Journal of International Relations Diponegoro* 6 (1): 135–43. <https://doi.org/10.14710/jirud.v6i1.26401>.
- Ashley Samberg. 2021. “China’s import of Venezuelan crude continues despite US sanctions.” June 14. <https://globalbusinessoutlook.com/magazine/oil-and-gas-magazine/chinas-import-of-venezuelan-crude-continues-despite-us-sanctions/>.
- Atalayar. 2025. “China Seeks to Circumvent US Sanctions to Continue Buying Venezuelan Oil.” Atalayar, March 28. <https://www.atalayar.com/en/articulo/economy-and-business/china-seeks->

[to-circumvent-us-sanctions-to-continue-buying-venezuelan-oil/20250328100000212658.html](https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2025/01/maximum-pressure-sanctions-on-venezuela.pdf.pdf).

Atlantic Council. 2025. "Maximum-Pressure-Sanctions-on-Venezuela.Pdf.Pdf." <https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2025/01/maximum-pressure-sanctions-on-venezuela.pdf.pdf>.

Avila, Flor, Jaime Cárdenas, Fernanda Navas-Camargo, and Paula Cifuentes. 2023. *Colombian-Venezuelan Land Border Relationship: Human Rights Vulnerability and Geopolitical Context*. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-13607-8\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-031-13607-8_9).

Baran, Paul A. n.d. *The Political Economy of Growth*.

Barredo, Juan, and Daniel Feliciano. 2025. "Venezuela's Economic Merry-Go-Round in the 21st Century: A Study through the Prism of the Political Management of the Oil Rent." *Resources Policy* 105 (June): 105587. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2025.105587>.

BBC News Indonesia. 2016. "Harga minyak turun tajam, ekonomi Arab Saudi terancam?" January 29. [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/01/160129\\_majalah\\_saudi\\_minyak](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/01/160129_majalah_saudi_minyak).

Bello, Omar D., Juan S. Blyde, and Diego Restuccia. 2011. "VENEZUELA'S GROWTH EXPERIENCE." *Latin American Journal of Economics* 48 (2): 199–226. <https://doi.org/10.4067/S0719-04332011000200005>.

Birken, A M. n.d. *Gulf of Venezuela: Border Dispute*.

Blanco, Uriel. 2025. "Maduro Calls on China as US Mounts Pressure on Venezuela. Will It Answer?" CNN, August 23. <https://www.cnn.com/venezuela-china-us-maduro-xi-jinping-trump-intl-latam>.

Bloomberg. 2017. "Venezuela's Bond Investors Are Wondering If They've Been Dumped." Accessed November 3, 2025. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-19/venezuela-s-bond-investors-are-wondering-if-they-ve-been-dumped>.

Briceño-Ruiz, José, and Norbert Molina Medina. 2020. "China–Venezuela Relations in a Context of Change." In *China–Latin America Relations in the 21st Century*, edited by Raúl Bernal-Meza and Li Xing. International Political Economy Series. Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-35614-9\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-030-35614-9_6).

Britannica. n.d. "Essequibo | History, Oil, Contested Territory, & Map | Britannica." Accessed November 3, 2025. <https://www.britannica.com/place/Essequibo>.

Brookings. 2019. "Made by Maduro: The Humanitarian Crisis in Venezuela and US Policy Responses." Accessed November 2, 2025.

<https://www.brookings.edu/articles/made-by-maduro-the-humanitarian-crisis-in-venezuela-and-us-policy-responses/>.

- Brown, Phillip; Margesson, Rhoda; Nelson, Rebecca M.; Seelke, Clare Ribando. 2022. "Venezuela: Background and U.S. Relations." Accessed November 1, 2025. <https://www.congress.gov/crs-product/R44841>.
- Budisatria, Tegar, Binsar Hamoraon Hasibuan, and Rezha Hidayat Dwiputra. 2022. "HIPERINFLASI VENEZUELA: DAMPAKNYA TERHADAP POSISI STRATEGIS AMERIKA SERIKAT-VENEZUELA." *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 27 (1): 63–80. <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v27i1.2897>.
- Bull, Benedicte, and Antulio Rosales. 2020. "Into the Shadows: Sanctions, Rentierism, and Economic Informalization in Venezuela." *European Review of Latin American and Caribbean Studies / Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y Del Caribe*, no. 109: 107–33.
- Bull, Benedicte, and Antulio Rosales. 2024. "Elite Dynamics and China's Influence in Latin America." *Development and Change* 55 (October). <https://doi.org/10.1111/dech.12861>.
- Bull, Benedicte, and Antulio Rosales. n.d. "Chinese Impact on Development in Venezuela: The Dynamics of Structural Stagnation." *New Political Economy* 0 (0): 1–20. <https://doi.org/10.1080/13563467.2025.2531004>.
- Cambridge. 2024. "The United States Provides and Then Rescinds Sanctions Relief for Venezuela." *American Journal of International Law* 118 (2): 344–49. <https://doi.org/10.1017/ajil.2024.18>.
- Cardona Romero. 2016. "China-Prestamos-Petroleo-Publicacion-AAS-2016.Pdf." Accessed November 2, 2025. <https://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2017/01/China-prestamos-petroleo-publicacion-AAS-2016.pdf>.
- Cimmino, Jeffrey. 2024. "Beijing's Influence on Latin America's Energy Mix Is Growing—Especially in Renewables." *Atlantic Council*, February 12. <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/beijings-influence-on-latin-americas-energy-mix-is-growing-especially-in-renewables/>.
- CMC. 2025. "G7 Foreign Ministers Condemn Venezuela's Violation of Guyana's Territorial Waters." *Caribbean Today*, March 18. <https://www.caribbeantoday.com/fr/sections/regional/g7-foreign-ministers-condemn-venezuela-s-violation-of-guyana-s-territorial-waters>.
- COHA. 2015. "Colombia and Venezuela: The Border Dispute Over the Gulf." COHA, August 13. <https://coha.org/colombia-and-venezuela-the-border-dispute-over-the-gulf/>.

- Cristina Dib, Alex Bare. 2025. "Venezuela's New NGO Law and U.S. Funding Freeze Are a Death Blow to the Country's Civil Society - Venezuela (Bolivarian Republic of) | ReliefWeb." 2025. April 9. <https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/venezuelas-new-ngo-law-and-us-funding-freeze-are-death-blow-countrys-civil-society>.
- Delfino. 2019. "Costa Rica reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela." Accessed November 3, 2025. <https://delfino.cr/2019/01/costa-rica-reconoce-a-juan-guaido-como-presidente-interino-de-venezuela>.
- Department of treasury. 2024. "Frequently Asked Questions Related to the Suspension of Certain U.S. Sanctions with Respect to Venezuela on October 18, 2023." Accessed November 2, 2025. <https://ofac.treasury.gov/media/932821/download?inline>.
- Department of treasury. 2024. "Venezuela Sanctions Regulations 31 CFR part 591." Accessed November 2, 2025. <https://ofac.treasury.gov/media/932561/download?inline>.
- Deringer. 2025. "New Tariffs on Countries Importing Venezuelan Oil." Accessed November 2, 2025. <https://www.anderinger.com/tariffs-importing-venezuelan-oil/>.
- Dialogue Earth. 2016. "China Is a Long-Term Player in Venezuela's Energy Future." *Dialogue Earth*, June 23. <https://dialogue.earth/en/energy/6895-china-is-a-long-term-player-in-venezuelas-energy-future/>.
- Diana Roy, Cheatham. 2024. "Venezuela: The Rise and Fall of a Petrostate | Council on Foreign Relations." Accessed November 1, 2025. <https://www.cfr.org/backgrounder/venezuela-crisis>.
- Diego Restuccia. n.d. "The History of Venezuela". Accessed November 1, 2025. <https://manifold.bfi.uchicago.edu/system/resource/9/7/f/97f686ed-07e8-46ac-b88e-cd284bdb79/attachment/0cb964110e25c6b781b8902f1d562805.pdf>
- Dominguez, Francisco. 2024. "The Venezuela–China Strategic Relationship and the Building of a Multipolar World." *World Review of Political Economy* 15 (4): 582–610. <https://doi.org/10.13169/worlrevipoliecon.15.4.0582>.
- DPPA UN. n.d. "Border Controversy between Guyana and Venezuela | Department of Political and Peacebuilding Affairs." Accessed November 3, 2025. <https://dppa.un.org/en/mission/border-controversy-between-guyana-and-venezuela>.
- Duncan, Natricia, and Neil Marks. 2025. "Guyana Triggers Military Response after Venezuelan Vessel Enters Its Waters." World News. *The Guardian*, March 1. <https://www.theguardian.com/world/2025/mar/01/guyana-triggers-military-response-after-venezuelan-vessel-enters-its-waters>.

- Dw.Com. n.d. “Maduro Rejects Humanitarian Aid – DW – 02/08/2019.” Accessed November 2, 2025. <https://www.dw.com/en/venezuela-maduro-rejects-humanitarian-aid-as-nation-starves/a-47435665>.
- EBSCO. n.d. “Venezuela’s energy production | Research Starters | EBSCO Research.” Accessed November 3, 2025. <https://www.ebsco.com>.
- Editor. 2025. “Venezuela’s Actions Threaten ‘peace, Good Order & Security’ - Guyana Formally Protests Recent Incursion.” *News Room Guyana*, March 4. <https://newsroom.gy/2025/03/03/venezuelas-actions-threaten-peace-good-order-security-guyana-formally-protests-recent-incursion/>.
- Ellis, Catherine. n.d. “Borders and Ballots: Why Essequibo Is Controversial in Venezuela’s Election.” *Al Jazeera*. Accessed November 3, 2025. <https://www.aljazeera.com/news/longform/2025/5/23/borders-and-ballots-why-essequibo-is-controversial-in-venezuelas-election>.
- Energy News. 2024. “Brazil Overtakes Malaysia As Top Supplier Of Venezuelan Heavy Crudes To China - Energynews.Pro. Accessed November 2, 2025. <https://energynews.pro/en/brazil-overtakes-malaysia-as-top-supplier-of-venezuelan-heavy-crudes-to-china/>.
- Estilo, Duclos, Diagramacion, Barreto. 2021. “LA PERCEPCIÓN PÚBLICA RESPECTO A LAS PERSONAS VENEZOLANAS EN EL ESPEJO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL PERÚ” n.d. Accessed November 3, 2025. [https://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2021/10/20225310/Diagno%CC%81stico-de-medios\\_18\\_oct.pdf](https://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2021/10/20225310/Diagno%CC%81stico-de-medios_18_oct.pdf).
- Estímulo. 2019. “FMI: Las sanciones aumentan y la crisis de Venezuela es cada vez peor.” February 28. <https://elestimulo.com/venezuela/2019-02-28/fmi-las-sanciones-aumentan-y-la-crisis-de-venezuela-es-cada-vez-peor/>.
- Focus Malaysia. 2020. “Malaysian Link in Venezuelan Oil Shipments to China despite US Sanctions.” Accessed November 2, 2025. [https://focusmalaysia.my/malaysian-link-in-venezuelan-oil-shipments-to-china-despite-us-sanctions/#google\\_vignette](https://focusmalaysia.my/malaysian-link-in-venezuelan-oil-shipments-to-china-despite-us-sanctions/#google_vignette).
- Francisco Rodríguez. n.d. “Sanctioning-Venezuela-3.Pdf.” n.d. Accessed November 2, 2025. <https://francisorodriguez.net/wp-content/uploads/2022/03/sanctioning-venezuela-3.pdf>.
- Frank Muci. 2024. “Why Did Venezuela’s Economy Collapse?.” Accessed November 1, 2025. <https://www.economicsobservatory.com/why-did-venezuelas-economy-collapse>.
- García Pinzón, Viviana, and Jorge Mantilla. 2021. “Contested Borders: Organized Crime, Governance, and Bordering Practices in Colombia-Venezuela

- Borderlands.” *Trends in Organized Crime* 24 (June). <https://doi.org/10.1007/s12117-020-09399-3>.
- Girish Gupta. 2016. “Smuggling Soars as Venezuela’s Economy Sinks” Accessed November 1, 2025. <https://www.reuters.com/article/us-venezuela-smuggling-insight/smuggling-soars-as-venezuelas-economy-sinks-idUSKCN0UY1IT/>.
- Global Americans. 2023. “How Sanctions Contributed to Venezuela’s Economic Collapse.” *Global Americans*, January 9. <https://globalamericans.org/how-sanctions-contributed-to-venezuelas-economic-collapse/>.
- Global Law Firm. 2024. “Venezuela Ratifies New Bilateral Investment Treaty with China | Herbert Smith Freehills Kramer.” Accessed November 3, 2025. <https://www.hsfkramer.com/notes/latamlaw/2024-posts/Venezuela-ratifies-new-bilateral-investment-treaty-with-China>.
- González, Luis Eduardo Ynciarte. 2021. “Migración venezolana y discriminación en Ecuador durante el 2019: análisis del encuadre informativo en Teleamazonas y El Universo.” *Estado & comunes* 1 (12): 97–114. [https://doi.org/10.37228/estado\\_comunes.v1.n12.2021.213](https://doi.org/10.37228/estado_comunes.v1.n12.2021.213).
- Hare, Paul Webster. 2025. “Trump and Maduro refresh a complex relationship governed by self-interest and tainted by Venezuela election fraud.” *The Conversation*, February 13. <https://doi.org/10.64628/AAI.ggmsjhr9t>.
- Haughton, Suzette A., and Cush Sewell Lewis. 2024. “Colombia-Venezuela border: Securitisation of migration and Venezuela’s political crisis.” *OASIS*, no. 40 (June): 129–58. <https://doi.org/10.18601/16577558.n40.07>.
- ICC Dispute Resolution Bulletin 2017 | Issue 1*. 2025. no. 1.
- IDCPC. 2024. “Xi Congratulates Maduro on Re-Election as Venezuela’s President.” Accessed November 3, 2025. [https://www.idcpc.gov.cn/english2023/ttxw\\_5749/202408/t20240807\\_164808.html](https://www.idcpc.gov.cn/english2023/ttxw_5749/202408/t20240807_164808.html).
- Impact of USAID Funding Freeze - Coalición por Venezuela*. 2025. April 2. <https://coalicionporvenezuela.org/impact-of-usaid-funding-freeze/>.
- International Crisis Group. 2023. “Barbados Deal Sets Venezuela on a Rocky Path to Competitive Polls.” 2023. October 20. <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/venezuela/barbados-deal-sets-venezuela-rocky-path-competitive-polls>.
- International Crisis Group. 2025. “Venezuela Presses Territorial Claims as Dispute with Guyana Heats Up .” April 8. <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/venezuela-guyana/venezuela-presses-territorial-claims-dispute-guyana-heats>.

- Investopedia. 2025 “How Does the Price of Oil Affect Venezuela’s Economy?” Accessed November 3, 2025. <https://www.investopedia.com/ask/answers/032515/how-does-price-oil-affect-venezuelas-economy.asp>.
- Iskandar, Fathur Octaviano, and Faisyal Rani. 2021. “KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT TERLIBAT DALAM KONFLIK DOMESTIK VENEZUELA TAHUN 2019.” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8 (1): 1–15.
- Jackson, Noah. n.d. *China-Venezuela Relations in the 21st Century and a Proposed U.S. Policy Response*.
- Jie Guo. 2023. “The Political Economy of China–Latin America Relations: The Making of a Post-Boom Paradigm | China International Strategy Review.” Accessed November 3, 2025. <https://link.springer.com/article/10.1007/s42533-023-00126-5>.
- Kaplan, Stephen B. 2016. “Banking Unconditionally: The Political Economy of Chinese Finance in Latin America.” *Review of International Political Economy* 23 (4): 643–76. <https://doi.org/10.1080/09692290.2016.1216005>.
- Kaplan, Stephen B., and Michael Penfold. 2019. “China-Venezuelan Economic Relations: Hedging Venezuelan Bets with Chinese Characteristics.” SSRN Scholarly Paper 3459035. Social Science Research Network, February 20. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3459035>.
- Luis Oliveros. 2020. “The Impact of Financial and Oil Sanctions on the Venezuelan Economy.” Accessed November 2, 2025. <https://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/10/Oliveros-report-summary-ENG.pdf>.
- Martinez, Juan. 2025. “Venezuela’s Oil Exports Hold Steady as China Steps In.” *The Rio Times*, June 3. <https://www.riotimesonline.com/venezuelas-oil-exports-hold-steady-as-china-steps-in/>.
- Matamis, Joaquin. 2024. “Venezuela, the State That Refuses to Collapse • Stimson Center.” *Stimson Center*, February 16. <https://www.stimson.org/2024/venezuela-the-state-that-refuses-to-collapse/>.
- Mendes, Carmen. 2012. “China in South America: Argentina, Brazil and Venezuela.” *East Asia* 30 (March). <https://doi.org/10.1007/s12140-012-9187-y>.
- Michelotti, Carla. 2015. “Semana: Claves del conflicto entre Colombia y Venezuela.” *Analitica.com*, June 23. <https://www.analitica.com/actualidad-internacional/semana-claves-del-conflicto-entre-colombia-y-venezuela/>.
- Migracion Colombia Distribucion. 2022. “DISTRIBUCIÓN DE VENEZOLANOS EN COLOMBIA.” Accessed November 3, 2025.

<http://fronteraysociedad.org/wp-content/uploads/2022/07/Migracion-Colombia-Distribucion-de-venezolanos-en-Colombia-febrero-2022.pdf>.

Ministry of Foreign Affairs. n.d. “History of Guyana Venezuela Border Conflict.” Accessed November 3, 2025. <https://minfor.gov.gy/history-guyana-venezuela-border-conflict>.

Motin, Dylan. 2024. *Bandwagoning in International Relations: China, Russia, and Their Neighbors*.

Muhammad Ghufroon. 2020. “PENGARUH KEBIJAKAN PEMANGKASAN KUOTA PRODUKSI MINYAK ANGGOTA ORGANIZATION OF THE PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES (OPEC) TERHADAP KRISIS EKONOMI DI VENEZUELA (2007-2018).” S1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/2052/>.

Notibomba. 2019. “Régimen de JOH reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.” *NotiBomba*, January 23. <https://notibomba.com/regimen-de-joh-reconoce-a-juan-guaido-como-presidente-de-venezuela/>.

Noticias ONU. 2019. “Bachelet: Las nuevas sanciones de EE.UU a Venezuela pueden tener un impacto severo en la población.” 2019. August 8. <https://news.un.org/es/story/2019/08/1460361>.

Orders, Executive. 2025. “Imposing Tariffs on Countries Importing Venezuelan Oil.” The White House, March 24. <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/03/imposing-tariffs-on-countries-importing-venezuelan-oil/>.

Peláez, Hernando Holguín. n.d. *DERECHOS TERRITORIALES DE COLOMBIA*.

Philipp, Jennifer. 2023. “USAID Programs in Venezuela.” *The Borgen Project*, October 6. <https://borgenproject.org/usaaid-programs-in-venezuela/>.

Phillips, Tom, and Tom Phillips Latin America correspondent. 2018. “‘Liberate’ Venezuela from Maduro, Urges Bolsonaro Ally.” *World News. The Guardian*, December 16. <https://www.theguardian.com/world/2018/dec/16/liberate-venezuela-from-maduro-urges-bolsonaro-ally>.

Programa Cuba. n.d. “The Weakening Civil Society in Venezuela.” Accessed November 2, 2025. <https://www.programacuba.com/the-weakening-civil-society-in-vene>.

PSUV. 2017. “China y Venezuela Suman 790 Acuerdos de Cooperación En Áreas Estratégicas.” Accessed November 2, 2025. <http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/china-venezuela-acuerdos-cooperacion-areas-estrategicas-china-venezuela/>.

- Raghubir, Nazima. n.d. "How Essequibo Residents Are Grappling with Fears of a Venezuela Takeover." Al Jazeera. Accessed November 3, 2025. <https://www.aljazeera.com/news/2024/1/11/fears-simmer-in-essequibo-region-as-venezuela-eyes-the-disputed-territory>.
- Ramírez, Rafael. 2021. "The Venezuelan Oil Industry Collapse: Economic, Social and Political Implications." Text. IAI Istituto Affari Internazionali, November 8. <https://www.iai.it/en/pubblicazioni/c05/venezuelan-oil-industry-collapse-economic-social-and-political-implications>.
- RAV. n.d. "Refugees and Migrants from Venezuela." Accessed November 3, 2025. <https://www.r4v.info/en/refugeeandmigrants>.
- Rendon, Moises, and Sarah Baumunk. 2018. *When Investment Hurts: Chinese Influence in Venezuela*. April 3. <https://www.csis.org/analysis/when-investment-hurts-chinese-influence-venezuela>.
- Resilience. 2022. "The Status of Global Oil Production (Part 3)." *Resilience*, August 16. <https://www.resilience.org/stories/2022-08-16/the-status-of-global-oil-production-part-3/>.
- Reuters. 2016. "Venezuela Ex-Ministers Seek Probe into \$300 Billion in Lost Oil Revenue." Accessed November 1, 2025. <https://www.reuters.com/article/world/venezuela-ex-ministers-seek-probe-into-300-billion-in-lost-oil-revenue-idUSKCN0VB26F/>.
- Reuters. 2019. "Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela." *Americas*. January 23. <https://www.reuters.com/article/world/americas/colombia-reconoce-a-juan-guaid-como-presidente-de-venezuela-idUSKCN1PH2JS/>.
- Reuters. 2019. "Perú Reconoce a Líder Del Congreso Opositor Juan Guaidó Como Presidente Encargado de Venezuela | Reuters." Accessed November 3, 2025. <https://www.reuters.com/article/venezuela-peru-idLTAKCN1PH2K9/>.
- Reuters. 2020. "EXCLUSIVA-Cómo Perdió Venezuela Tres Superpetroleros Frente a Su Socio Chino." Accessed November 2, 2025. <https://www.reuters.com/article/business/exclusiva-cmo-perdi-venezuela-tres-superpetroleros-frente-a-su-socio-chino-idUSKCN25722Q/>.
- Reuters. 2021. "Venezuelan Oil, Masked as Malaysian, Rushes into China before Fuel Tax" Accessed November 2, 2025. <https://www.reuters.com/business/energy/venezuelan-oil-masked-malaysian-rushes-into-china-before-fuel-tax-2021-06-04/>.
- Reuters. 2023. "China's Oil Trade and Investment in Venezuela." Accessed November 1, 2025. <https://www.reuters.com/business/energy/chinas-oil-trade-investment-venezuela-2023-09-12/>.

- Reuters. 2025. “EXCLUSIVA Una Empresa Privada China Produce Petróleo En Venezuela En Virtud de Un Pacto de 20 Años.” Accessed November 3, 2025.  
<https://www.reuters.com/es/negocio/CV4L7ZWFOJOBHDWKYQBJ5FIN2Y-2025-08-22/>.
- Reuters. 2025a. “Venezuela’s Oil Exports Fell in July as Partners Awaited US Authorizations.” *Energy*. August 4.  
<https://www.reuters.com/business/energy/venezuelas-oil-exports-fell-july-partners-awaited-us-authorizations-2025-08-04/>.
- Reuters. 2025b. “Venezuela’s Oil Exports on the Rise as More Cargoes Head to China.” *Energy*. July 2.  
<https://www.reuters.com/business/energy/venezuelas-oil-exports-rise-more-cargoes-head-china-2025-07-02/>.
- Reuters. 2025c. *Venezuela’s Oil Exports Stable as Buyers in China Receive More | BOE Report*. June 3. <https://boereport.com/2025/06/03/venezuelas-oil-exports-stable-as-buyers-in-china-receive-more/>.
- Reuters. 2025d. “Venezuela’s Oil Exports Stable as Buyers in China Receive More.” *Energy*. June 3.  
<https://www.reuters.com/business/energy/venezuelas-oil-exports-stable-buyers-china-receive-more-2025-06-03/>.
- Ríos, Xulio. 2013. “China and Venezuela: Ambitions and Complexities of an Improving Relationship.” *East Asia* 30 (1): 53–65.  
<https://doi.org/10.1007/s12140-012-9185-0>.
- Rodríguez, Francisco, and Lakshmi Iyer. 2021. *Hyperinflation in Venezuela*. Report. University of Notre Dame. <https://doi.org/10.7274/r0-z7wm-f385>.
- Rodríguez, Francisco. 2022. “Sanctions and Oil Production: Evidence from Venezuela’s Orinoco Basin.” *Latin American Economic Review* 31 (September): 31–31. <https://doi.org/10.60758/laer.v31.33>.
- Rosales, Antulio, and Kelsey Shaw. 2023. *Chinese Finance in Venezuela: A Non-Interventionist Lender’s Trap*. 1 (March): 64–72.
- Rosales, Antulio. 2023. “Chinese Finance in Venezuela: A Non-Interventionist Lender’s Trap.” *Global China Pulse*, March 3.  
<https://thepeoplesmap.net/globalchinapulse/chinese-finance-in-venezuela-a-non-interventionist-lenders-trap/>.
- Roy, Diana. n.d.-a. “China’s Growing Influence in Latin America | Council on Foreign Relations.” Accessed November 3, 2025.  
<https://www.cfr.org/backgrounder/china-influence-latin-america-argentina-brazil-venezuela-security-energy-bri>.

- Roy, Diana. n.d.-b. "Do U.S. Sanctions on Venezuela Work? | Council on Foreign Relations." Accessed November 2, 2025. <https://www.cfr.org/in-brief/do-us-sanctions-venezuela-work>.
- Royal Navi. 2024. "Royal Navy Patrol Ship Visits Guyana amid Border Claim." Accessed November 3, 2025. <https://www.royalnavy.mod.uk/news/2024/january/18/240118-trent-in-guyana>.
- RTL Today. 2018. "What Impact Would a US Oil Embargo Have on Venezuela?." Accessed November 1, 2025. <https://today.rtl.lu/news/world/a/1143612.html>.
- Sabatini. 2025. "History Suggests Trump's Snapped Back Sanctions Won't Deliver Change in Venezuela." January 28. <https://www.chathamhouse.org/2025/06/history-suggests-trumps-snapped-back-sanctions-wont-deliver-change-venezuela>.
- Sanderson, Henry, and Michael Forsythe. 2012. *China's Superbank: Debt, Oil and Influence - How China Development Bank Is Rewriting the Rules of Finance*. John Wiley & Sons.
- Seelke, Clare R, Rebecca M Nelson, Rhoda Margesson, and Phillip Brown. n.d. *Venezuela: Background and U.S. Relations*.
- Seelke, Clare R. n.d. *Venezuela: Political Crisis and U.S. Policy*.
- Seelke, Clare Ribando. n.d. *Venezuela: Overview of U.S. Sanctions Policy*.
- Statista. n.d. "Venezuela - Inflation Rate 2026." Accessed November 1, 2025. <https://www.statista.com/statistics/371895/inflation-rate-in-venezuela/>.
- Statista. n.d. "Venezuela: Inflation rate from 1985 to 2026." Accessed November 1, 2025. <https://www.statista.com/statistics/371895/inflation-rate-in-venezuela/>.
- Strauss Center. n.d. "Venezuela." Accessed November 1, 2025. <https://www.strausscenter.org/energy-and-security-project/venezuela/>.
- The Washington Post. 2019. "Trump Administration Announces Sanctions Targeting Venezuela's Oil Industry." Accessed November 2, 2025. [https://www.washingtonpost.com/national/health-science/trump-administration-announces-sanctions-targeting-venezuelas-oil-industry/2019/01/28/4f4470c2-233a-11e9-90cd-dedb0c92dc17\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/national/health-science/trump-administration-announces-sanctions-targeting-venezuelas-oil-industry/2019/01/28/4f4470c2-233a-11e9-90cd-dedb0c92dc17_story.html).
- The White House. 2018. "Remarks by Vice President Pence on the Administration's Policy Toward China." Accessed November 3, 2025. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-administrations-policy-toward-china/>.

- TrademeX. 2024. "Venezuela Oil Exports and Production in 2024-25." Accessed November 2, 2025. <https://www.tradeimex.in/blogs/venezuela-oil-exports-and-production>.
- Trading Economics. n.d. "China Imports from Venezuela." Accessed November 2, 2025. <https://tradingeconomics.com/china/imports/venezuela>.
- Trinkunas, Harold A. n.d. *Defining Venezuela's "Bolivarian Revolution."*
- U.S. Energy Information Administration (EIA). 2023. "Venezuela's Heavy Crude Oil Output Increases Are Limited Following U.S. Sanctions Relief." Accessed November 2, 2025. <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=60762>.
- U.S. Southern Command. n.d. "DoD, DoS, USAID Work Together to Provide Aid for Venezuelans." Accessed November 1, 2025. <https://www.southcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/Article/1760186/dod-dos-usaid-work-together-to-provide-aid-for-venezuelans/>.
- UNDP Climate Change Adaptation. n.d. "Venezuela (Bolivarian Republic of) Latin America and the Caribbean." Accessed November 2, 2025. <https://www.adaptation-undp.org/explore/latin-america-and-caribbean/venezuela-bolivarian-republic>.
- UNHCR. 2025. "Venezuela Situation | UNHCR." n.d. Accessed November 3, 2025. <https://www.unhcr.org/emergencies/venezuela-situation>.
- United States Department of State. n.d. "Venezuela-Related Sanctions." Accessed November 2, 2025. <https://www.state.gov/venezuela-related-sanctions/>.
- United States Institute of Peace. n.d. "China-Venezuela Relations in the Twenty-First Century: From Overconfidence to Uncertainty." Accessed November 2, 2025. <https://www.usip.org/publications/2020/09/china-venezuela-relations-twenty-first-century-overconfidence-uncertainty>.
- USA for UNHCR. 2024. "Venezuela Crisis Explained." Accessed November 2, 2025. <https://www.unrefugees.org/news/venezuela-crisis-explained/>.
- Van Roekel, Eva, and Marjo De Theije. 2020. "Hunger in the Land of Plenty: The Complex Humanitarian Crisis in Venezuela." *Anthropology Today* 36 (2): 8–12. <https://doi.org/10.1111/1467-8322.12561>.
- Venezuela, La Hora de. 2025. "How Chevron's Exit Will Impact the Venezuelan Economy." *Caracas Chronicles*, March 19. <https://www.caracaschronicles.com/2025/03/19/how-chevrons-exit-will-impact-the-venezuelan-economy/>.
- Vivian Sequera. 2022. "Venezuela Poverty Rate Falls to 50.5% in 2022 -Study." Accessed November 2, 2025.

<https://www.reuters.com/world/americas/venezuela-poverty-rate-falls-505-2022-study-2022-11-10/>.

Weisbrot, Mark, and Jeffrey Sachs. n.d. *Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela*.

Wilkinson, Bert. 2024. "US DEFENSE OFFICIAL VISITS GUYANA – Caribbean Life." January 10. <https://www.caribbeanlife.com/us-defense-official-visits-guyana/>.

Zerpa, Fabiola. 2021. "China's Top Oil Producer Prepares to Revive Venezuela Operations." *Bloomberg.Com*, September 1. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-01/china-s-top-oil-producer-prepares-to-revive-venezuela-operations>.

Johnston, Karin L. 2025. "China, Latin America, and the United States: Geopolitical Impacts and New Challenges." Accessed November 18. <https://www.kas.de/en/web/usa/single-title/-/content/china-latin-america-and-the-united-states-geopolitical-impacts-and-new-challenges>.

P., Walter. n.d. "Teori Neo-Realisme dalam Hubungan Internasional." Accessed November 18. <https://www.seniberpikir.com/teori-neo-realisme/>.

Zhou, Qian. 2025. "China-Colombia Economic Ties: A Growing Partnership in Latin America." Accessed November 18. <https://www.china-briefing.com/news/china-colombia-economic-ties-trade-investment/>.

Ray, Rebecca, dkk. 2024. "China-Latin America and the Caribbean Economic Bulletin." Accessed November 18. <https://www.bu.edu/gdp/files/2024/07/GCI-China-LAC-Bulletin-2024-FIN.pdf?utm>.

Bloomberg. 2025. "Venezuela Partners With Smaller Oil Firms as Chevron Scales Back." Accessed November 18. [https://www.rigzone.com/news/wire/venezuela\\_partners\\_with\\_smaller\\_oil\\_firms\\_as\\_chevron\\_scales\\_back-05-jun-2025-180768-article/](https://www.rigzone.com/news/wire/venezuela_partners_with_smaller_oil_firms_as_chevron_scales_back-05-jun-2025-180768-article/).

Creutzfeldt, Alvarado. 2024. "Venezuela, the State That Refuses to Collapse

What is China's Role?." Accessed November 18. <https://www.stimson.org/2024/venezuela-the-state-that-refuses-to-collapse/>.

PowerChina. 2024. "Colombian Tepuy PV project handed over". Accessed November 18. [https://en.powerchina.cn/2024-10/14/c\\_828797.htm?utm](https://en.powerchina.cn/2024-10/14/c_828797.htm?utm).

Bittle, June S. 2023. "U.S.-Colombia Security Relations: Future Prospects in Brief." Accessed November 18. <https://www.congress.gov/crs-product/R47426?utm=>.

hsfkramer.com. 2024. "Tiongkok dan Venezuela menandatangani Perjanjian Investasi Bilateral baru." Accessed November 18.  
<https://www.hsfkramer.com/notes/publicinternationallaw/2024-posts/China-and-Venezuela-enter-into-new-Bilateral-Investment-Treaty>.